

Katalog BPS: 4102004.91

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Katalog BPS: 4102004.91

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
2015**

*WELFARE INDICATORS OF PAPUA BARAT PROVINCE
2015*

ISSN : 2089-1652

No. Publikasi/*Publication Number* : 91520.16.14

Katalog BPS/*BPS Catalogue* : 4102004.91

Ukuran Buku/*Book Size* : 16,5 cm x 21 cm

Jumlah Halaman/*Total Pages* : xix + 77 halaman (96 halaman)

Naskah/*Manuscript* :

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Barat

Gambar Kulit/*Cover Design* :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

BPS Provinsi Papua Barat

Diterbitkan Oleh/*Published by* :

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Dicetak Oleh/*Printed by* :

CV. Wahyu Mandiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/
atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



KATA PENGANTAR KEPALA BPS PROVINSI PAPUA BARAT

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2015 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan BPS Provinsi Papua Barat. Publikasi ini merupakan terbitan ketujuh yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Provinsi Papua Barat. Perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola dan taraf konsumsi, perumahan, serta indikator sosial lainnya.

Semua indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Survei ini telah dilaksanakan di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2006. Indikator ketenagakerjaan bersumber dari data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Kepada semua pihak yang secara aktif memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Manokwari, Agustus 2016
Kepala BPS Provinsi Papua Barat

Drs. Simon Sapary, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH	xv
TINJAUAN UMUM	xvii
I. KEPENDUDUKAN	1
Gambaran Umum Penduduk	1
Struktur Umur Penduduk	2
II. KESEHATAN	5
Angka Harapan Hidup	6
Morbiditas	7
Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan	8
Imunisasi dan ASI	9
III. PENDIDIKAN	13
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	14
Angka Partisipasi Murni (APM)	16
Harapan Lama Sekolah Dan Rata – Rata Lama Sekolah	18
Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	21

IV. KETENAGAKERJAAN	23
Struktur Penduduk Usia Kerja Agustus 2015	23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka	25
TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	26
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha	28
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan	30
Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja	31
V. TARAF DAN POLA KONSUMSI	33
Perembangan Kemiskinan di Papua Barat, 2006 - 2016	33
Perkembangan Tingkat Kesejahteraan	36
Perkembangan Distribusi Pendapatan	37
Konsumsi Rumah Tangga	40
VI. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	43
Air Minum Layak	46
Sanitasi Layak	48
Penerangan	51
VII. SOSIAL LAINNYA	53
Program Penanggulangan Kemiskinan	53
Teknologi Komunikasi dan Informasi	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Barat Tahun 2012–2015	3
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012–2015	25
Tabel 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013-2015	27
Tabel 4.3	Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011-2015	28
Tabel 4.4	Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2014-2015	30
Tabel 4.5	Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013–2015	31
Tabel 5.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat Menurut Daerah, 2006 - 2016	34
Tabel 5.2	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011–2015	36
Tabel 5.3	Ukuran Tingkat Pemerataan Pendapatan di Provinsi Papua Barat Menurut Bank Dunia dan Koefisien Gini, Tahun 2007 - 2016	39

Tabel 5.4 Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013 - 2015 _____	40
---	----

<http://papuabarat.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 _____	2
Gambar 2.1	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 _____	6
Gambar 2.2	Penolong Kelahiran Balita di Papua Barat Tahun 2009–2015 _____	9
Gambar 2.3	Cakupan Layanan Imunisasi Pada Bayi Usia 12–23 Bulan di Provinsi Papua Barat Tahun 2011–2015 _____	10
Gambar 2.4	Persentase Bayi 0–23 Bulan yang Mendapat ASI di Papua Barat Tahun 2015 _____	11
Gambar 3.1	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7–24 Tahun di Provinsi Papua Barat, Tahun 2007–2015 ____	14
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, Tahun 2015 _____	16
Gambar 3.3	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2007–2015 ____	17
Gambar 3.4	Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015 _____	18
Gambar 3.5	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Barat Tahun 2010–2015 ____	19

Gambar 3.6	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 _____	20
Gambar 3.7	Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun atau Lebih Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 _____	21
Gambar 4.1	Struktur Penduduk Usia Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus Tahun 2015 _____	24
Gambar 4.2	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Atau Lebih di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 _____	29
Gambar 5.1	Sebaran Penduduk Miskin di Papua Barat Tahun 2014 _____	35
Gambar 5.2	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 _____	37
Gambar 5.3	Persentase Komposisi Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 _____	41
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 _____	44
Gambar 6.2	Kondisi Perumahan Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011 - 2015 _____	45
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009 - 2015 _____	47

Gambar 6.4	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2015 _____	47
Gambar 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Sanitasi yang Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011 – 2015 _____	49
Gambar 6.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas BAB dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2015 _____	50
Gambar 6.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2015 _____	51
Gambar 7.1	Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Miskin di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 _____	54
Gambar 7.2	Persentase Rumah Tangga pada Kelompok 40% Pengeluaran Terendah yang Membeli/Menerima Beras Miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 _____	56
Gambar 7.3	Rata-rata Harga Beras Miskin Per Kg Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 _____	57
Gambar 7.4	Persentase Rumah Tangga Penerima BSM di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 _____	58



<http://papuabarat.bps.go.id>

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

I (1)	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2000, 2010 dan 2015 _____	62
I (2)	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012–2015 _____	63
II (1)	Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Barat Tahun 2011–2015 _____	64
II (2)	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 __	65
II (3)	Angka Kesakitan Penduduk di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012–2015 _____	66
III (1)	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 25 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011–2015_	67
III (2)	Harapan Lama Lama Sekolah Penduduk Berumur 7 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011–2015_	68
III (3)	Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Barat, 2014–2015 _____	69
III (4)	Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat, 2014–2015 _____	70
V (1)	Perkembangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2013 dan 2014 _____	71
V (2)	Garis Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2011–2016 __	72

V (3) Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2008–2016 _____	73
V (4) Kemampuan Daya Beli Masyarakat di Papua Barat, Tahun 2011–2015 _____	74
VI (1) Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Perumahan di Papua Barat, Tahun 2014–2015 _____	75
VI (2) Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2014–2015 _____	76
VI (3) Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2014–2015 _____	77
VII (1) Prsentase Rumah Tangga yang Mempunyai Alat Komunikasi Informasi dan Teknologi di Provinsi Papua Barat Tahun 2014–2014 _____	78
VII (2) Persentase Penduduk yang Mengakses Intenet di Provinsi Papua Barat Tahun 2015 _____	79

Tinjauan Umum

Ruang Lingkup

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Provinsi Papua Barat 2016 menyajikan gambaran perkembangan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat tahun 2016. Dimensi kesejahteraan rakyat sangat luas dan kompleks. Karena itu, taraf kesejahteraan rakyat dapat diukur melalui dimensi tertentu. Dalam publikasi ini, kesejahteraan rakyat diamati melalui berbagai aspek spesifik yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pengeluaran konsumsi rumah tangga, perumahan dan aspek sosial lainnya. Permasalahan kesejahteraan rakyat diukur baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit

Perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat hingga 2015 secara ringkas sebagai berikut:

Di bidang kependudukan:

- Penduduk Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 diproyeksikan menjadi 871.510 jiwa.
- Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2010 sampai dengan 2015 sebesar 2,27 persen per tahun.

- Sebaran penduduk Papua Barat tidak merata dengan kepadatan penduduk pada tahun 2015 sebesar 7–8 Jiwa/Km².
- *Dependency ratio*, yaitu perbandingan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun) dan penduduk usia produktif (15–64 tahun), masih cukup besar yaitu 49,85.

Di bidang kesehatan:

- Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Papua Barat tahun 2015 sebesar 65,19 tahun.
- Angka kesakitan penduduk turun dari 11,78 persen pada tahun 2014 menjadi 11,46 persen pada tahun 2015.
- Sebagian besar penolong kelahiran dari balita adalah tenaga kesehatan. Komposisi penolong kelahiran balita pada tahun 2015 adalah 72,02 persen oleh tenaga kesehatan dan 22,70 persen oleh bukan tenaga kesehatan.
- Persentase bayi 12–23 bulan yang telah mendapat imunisasi dasar (BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B) selama tahun 2011 sampai dengan 2015 fluktuatif.
- Pemberian ASI pada bayi 0–23 bulan pada tahun 2015 cukup baik. Rentang pemberian ASI di kabupaten/kota di Papua Barat antara 77,94 persen (Kabupaten Manokwari Selatan) dan 97,67 persen (Kabupaten Fakfak).

Di bidang pendidikan:

- Angka partisipasi sekolah (APS) tahun 2015 untuk APS 7 – 12 tahun sebesar 96,74 persen; APS 13–15 tahun sebesar 96,58 persen; APS 16–18 tahun sebesar 79,99 persen dan APS 19–24 tahun sebesar 29,66 persen.
- Angka partisipasi murni tahun 2015 untuk APM SD sebesar 92,90 persen; APM SMP sebesar 68,29 persen; APM SMA sebesar 62,40 persen dan APM PT sebesar 20,55 persen.
- Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Papua Barat tahun 2015 sebagian besar masih rendah. Penduduk 15 tahun atau lebih yang belum tamat SD sebesar 14,46 persen sementara mereka yang menamatkan perguruan tinggi hanya 10,83 persen.

Di bidang ketenagakerjaan:

- Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) berdasarkan hasil Sakernas 2015 diestimasi mencapai 602.248 jiwa.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2015 sebesar 68,68 persen, lebih tinggi daripada TPAK tahun 2014 yaitu sebesar 68,30 persen.
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2015 sebesar 8,08 persen, lebih tinggi daripada TPT tahun 2014 yaitu sebesar 5,02 persen.
- Mayoritas penduduk yang bekerja pada tahun 2015 terserap di sektor jasa. Penduduk Papua Barat yang

bekerja di sektor pertanian sebesar 42,11 persen, di sektor industri 10,57 persen dan di sektor jasa sebesar 47,32 persen.

- Secara umum terlihat bahwa pekerja di Papua Barat lebih dominan bekerja di sektor informal. Persentase pekerja di sektor informal mencapai 55,63 persen pada tahun 2015.

Taraf dan Pola Konsumsi

- Jumlah dan persentase penduduk miskin di Papua Barat Maret tahun 2016 sebesar 225.800 jiwa atau sebesar 25,43 persen,
- Rata-rata pengeluaran penduduk Papua Barat meningkat dari 906.477 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2014 menjadi 1.030.232 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2015
- Indeks *gini ratio* pada Maret 2016 sebesar 0,37 yang bermakna ada ketimpangan pendapatan tetapi masih dalam status ketimpangan sedang.
- Tingkat pemerataan menurut Bank Dunia mencatat 16,36 persen pengeluaran penduduk berasal dari kelompok rumah tangga dengan 40 persen pengeluaran terbawah dan 42,94 persen disumbang oleh kelompok rumah tangga dengan 20 persen pengeluaran teratas.

Di bidang perumahan

- Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri pada tahun 2015 sebesar 74,57 persen lebih tinggi daripada tahun 2014 yaitu sebesar 70,88 persen.

- Sebesar 68,85 persen rumah tangga di Papua Barat pada tahun 2015 telah mengakses air minum layak, lebih tinggi dari tahun 2014 yaitu sebesar 66,87 persen.
- Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2015 sebesar 62,81 persen lebih tinggi daripada tahun 2014 sebesar 61,85 persen.

Sosial Lainnya

- Akses penduduk terhadap program beras miskin di Papua Barat tahun 2015 sebagai berikut: Sebesar 33,33 persen di antara rumah tangga pada kelompok 20 persen pengeluaran terbawah membeli/menerima beras miskin. Sebaliknya, ada 4,82 persen rumah tangga pada kelompok 20% pengeluaran teratas juga menerima/membeli beras miskin.
- Pengguna telepon selular atau HP di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 telah mencapai 84,75 persen, meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu 75,53 persen.
- Penduduk Papua Barat yang mengakses internet pada tahun 2015 telah mencapai 31,14 persen naik dibandingkan dengan pengguna internet tahun 2014 yang mencapai 13,30 persen.

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT 2015

- Kependudukan
 - Kesehatan
 - Pendidikan
- Ketenagakerjaan
- Taraf dan Pola Konsumsi Rumah Tangga
- Perumahan dan Lingkungan
 - Sosial Lainnya



Bab 1

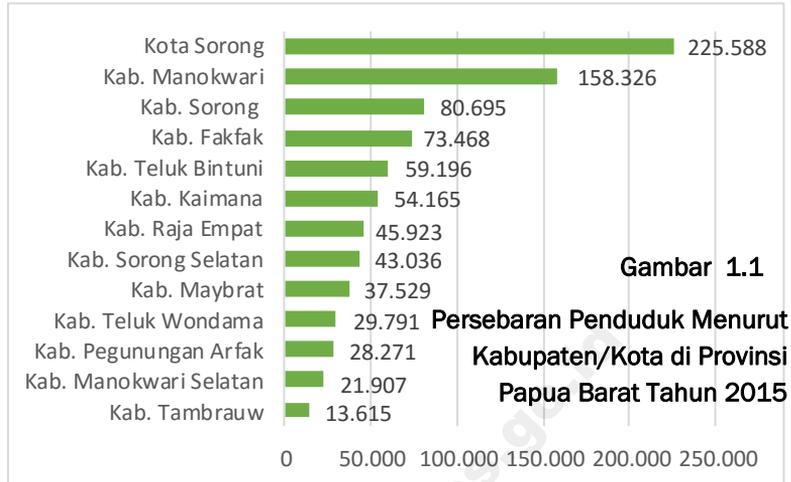
Kependudukan

Apapun yang akan dilaksanakan, muara akhir rancangan pembangunan adalah penduduk. Penduduk sebagai pelaku pembangunan di satu sisi dan sekaligus sebagai objek pembangunan di sisi lain. Apabila pembangunan berhasil maka keberhasilan pembangunan akan dinikmati oleh penduduk. Sebaliknya, apabila pembangunan gagal dilaksanakan maka penduduk pula yang merasakan dampak negatifnya.

Gambaran Umum Penduduk

Penduduk Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar 871.510 jiwa (BPS Provinsi Papua Barat, 2016). Penduduk laki-laki Lebih banyak daripada perempuan dengan rasio jenis kelamin 111 laki-laki berbanding 100 perempuan.

Penduduk Provinsi Papua Barat tersebar tidak merata. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015, lebih seperempat penduduk Provinsi Papua Barat tinggal di Kota Sorong dan 18 persen penduduk tinggal di Kabupaten Manokwari. Penduduk yang lain tersebar tidak merata di sebelas kabupaten lainnya dengan persentase kurang dari 10 persen (Gambar 1.1).



Gambar 1.1

Persebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015

Sebaran penduduk yang tidak merata tersebut berdampak pada kepadatan penduduk yang juga tidak merata. Kota Sorong dengan luas wilayah hanya 0,68 persen dari luas Papua Barat dihuni oleh 25,88 persen penduduk Papua Barat dengan kepadatan 204 penduduk per Km². Sebaliknya, Kabupaten Tambrau dengan luas 9,55 persen dari luas Papua Barat dihuni oleh 1,56 persen penduduk Papua Barat dengan kepadatan hanya satu jiwa per Km². Kabupaten Tambrau wilayah paling jarang penduduk di Papua Barat.

Struktur Umur Penduduk

Menurut Adioutomo (2011), pengaruh struktur penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

- Suplai tenaga kerja yang besar meningkatkan pendapatan per kapita apabila mendapat kesempatan kerja yang produktif;



- b. Peranan perempuan yang juga memasuki pasar kerja, membantu peningkatan pendapatan;
- c. Tabungan masyarakat yang diinvestasikan secara produktif;
- d. Modal manusia yang besar apabila ada investasi untuk itu.

Dampak keberhasilan pengendalian penduduk tercermin dari perubahan struktur umur penduduk yang terlihat dari berkurangnya proporsi penduduk usia tidak produktif khususnya 0–14 tahun. Di sisi lain, proporsi penduduk usia produktif bertambah. Akibatnya, angka beban ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif berkurang.

Tingginya proporsi penduduk 0–14 tahun mengakibatkan tingginya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*). Tabel 1.1 memperlihatkan angka beban ketergantungan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 sebesar 49,85. Artinya, di antara 100 penduduk usia produktif berumur 15–

Tabel 1.1 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Barat Tahun 2012–2015

Tahun	0-14	15-64	65 +	Rasio Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	32,28	65,84	1,88	51,89
2013	31,88	66,18	1,93	51,09
2014	31,55	66,45	2,00	50,49
2015	31,18	66,74	2,09	49,85

Sumber: BPS (2013), Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035



64 tahun, menanggung 49 hingga 50 penduduk yang tidak produktif. Hingga tahun 2015, penduduk usia tidak produktif masih didominasi oleh kelompok anak-anak (0–14 tahun). Konsekuensinya adalah pendapatan dari penduduk usia produktif terserap pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan anak-anak. Dengan demikian, masih dibutuhkan pembangunan sarana pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah juga dibutuhkan pembangunan sarana kesehatan.



Bab 2

Kesehatan

Mulai 1 Januari 2014, Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sebelumnya, dalam UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).

Sebelum program jaminan kesehatan nasional bergulir, Pemerintah RI telah menjalankan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan

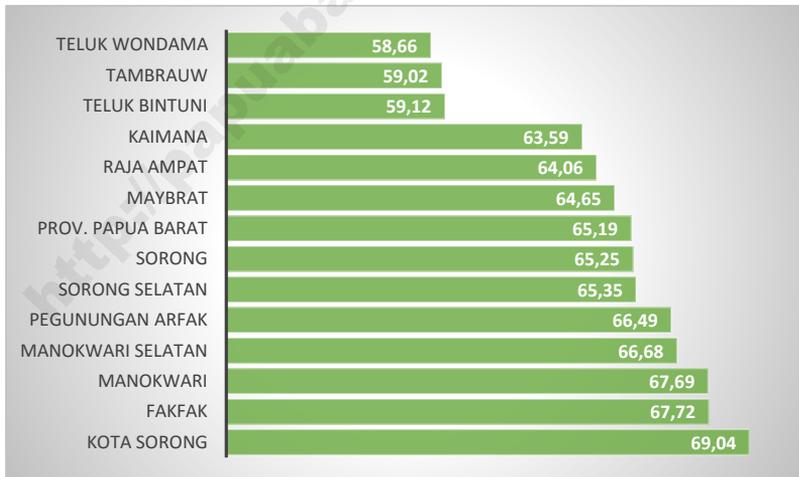


demikian, sebelum tahun 2014, pemerintah memberikan jaminan kesehatan terbatas pada penduduk miskin atau hampir miskin.

Sejauhmana program jaminan kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan di Papua Barat dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) Provinsi Papua Barat selama tahun 2011 hingga tahun 2015 meningkat (Lampiran II.1). AHH pada tahun 2011 mencapai 64,75 tahun meningkat menjadi 65,14 tahun pada tahun 2014. AHH tahun 2015 mencapai 65,14 tahun.



Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015



Ada perbedaan harapan hidup antar kabupaten/kota di Papua Barat. Pada tahun 2015, harapan hidup paling lama di Kota Sorong yang mencapai 69,40 tahun. AHH terendah Kabupaten Teluk Wondama yaitu 58,66 tahun.

Sejak tahun 2014, penghitungan AHH mengalami pembaharuan dari metode sebelumnya. Perubahan metode penghitungan AHH terkait dengan perubahan metode proyeksi penduduk yang semula menggunakan metode estimasi (geometrik) berubah menjadi metode component-cohort. Selain itu, adanya asumsi TFR nasional sebesar 2,1 di tahun 2025 turut mempengaruhi penghitungan angka harapan hidup baik di tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan ini, maka penghitungan AHH tahun sebelumnya juga direvisi. Data selengkapnya disajikan pada Lampiran II(1).

Morbiditas

Indikator lain untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan atau morbiditas. Angka ini menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah atau mengerjakan pekerjaan rumah.

Secara umum, angka kesakitan penduduk Papua Barat menurun. Penurunan angka kesakitan selama periode tahun 2012 sampai dengan 2015 di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Lampiran II (3). Angka kesakitan pada tahun 2015 sebesar 11,46 persen. Penurunan angka kesakitan tersebut berbanding terbalik dengan peningkatan angka



harapan hidup. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan di masyarakat.

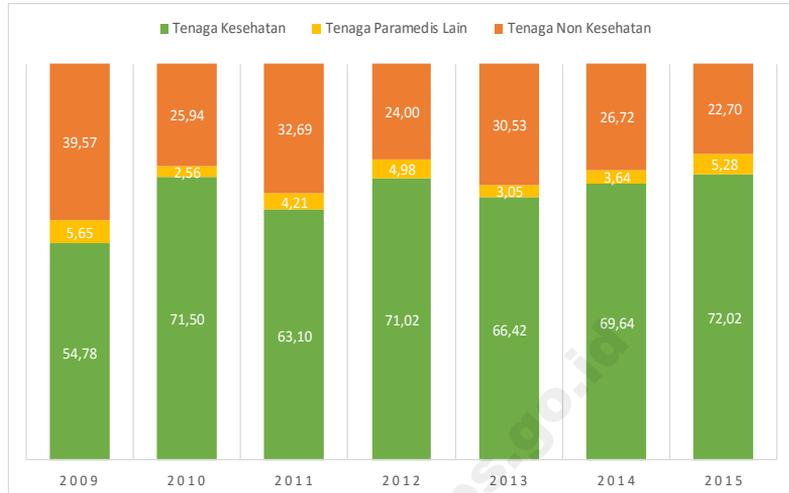
Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan

Penurunan angka kesakitan dan peningkatan angka harapan hidup tidak terlepas dari upaya pencegahan (preventif) dan kuratif (pengobatan) baik yang dilakukan oleh masing-masing individu maupun diinisiasi oleh pemerintah. Beberapa upaya preventif tersebut antara lain: peningkatan peran tenaga kesehatan dalam proses persalinan, peningkatan peran ibu dalam pemberian ASI eksklusif dan pemberian imunisasi.

Peningkatan peran tenaga kesehatan dalam proses persalinan bertujuan untuk mengurangi kasus kematian bayi. Dengan menurunkan jumlah kasus kematian bayi dapat meningkatkan lama harapan hidup.

Gambar 2.2 memperlihatkan persentase balita (0–59 bulan) menurut penolong kelahiran pada tahun 2009 hingga tahun 2015. Persentase penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan selama periode tersebut tampak fluktuatif tetapi menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2015, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di Provinsi Papua Barat sebesar 72,02 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 69,64 persen. Sebaliknya, persentase penolong kelahiran oleh tenaga non kesehatan berkurang dari 26,72 persen pada tahun 2014 menjadi 22,70 persen pada tahun 2015.

Persentase penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan tertinggi di Kota Sorong dan terendah di Kabupaten Pegunungan Arfak. Pembangunan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Pegunungan Arfak tergolong lambat.



Gambar 2.2 Penolong Kelahiran Balita di Papua Barat Tahun 2009–2015

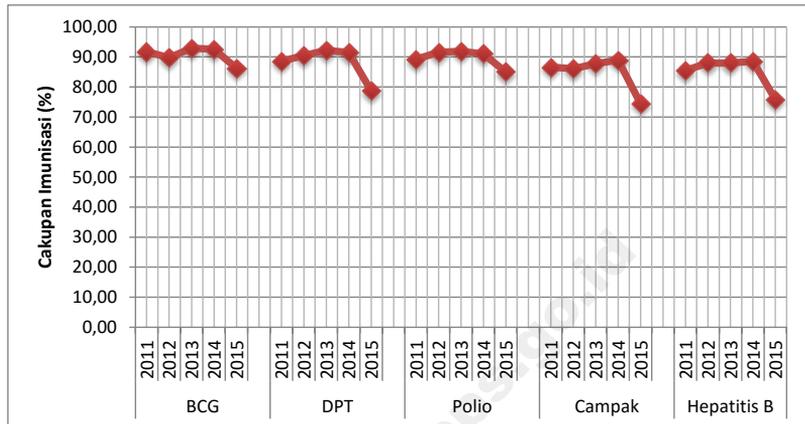
Imunisasi dan ASI

Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi dan mencegah dari penyakit agar anak tetap sehat.

Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi berumur satu tahun adalah BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B. Waktu pemberiannya sudah ditetapkan secara bertahap. Imunisasi BCG diberikan satu kali pada anak usia 0-2 bulan. Demikian juga untuk imunisasi Polio dan Hepatitis B untuk pertama kali. Imunisasi DPT dan Polio diberikan secara bersamaan dan berulang pada usia 2, 3, atau 4 bulan dan pengulangannya 4 bulan kemudian sebanyak 3 kali. Imunisasi campak diberikan sebanyak 2 kali. Pertama, pada saat anak berumur 9 bulan



Gambar 2.3 Cakupan Layanan Imunisasi Pada Bayi Usia 12 – 23 Bulan di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2015



Sumber: BPS, Susenas 2011–2015

atau lebih, dan kedua diberikan pada usia 5-7 tahun. Pada kejadian luar biasa dapat diberikan pada usia 6 bulan dan diulangi 6 bulan kemudian.

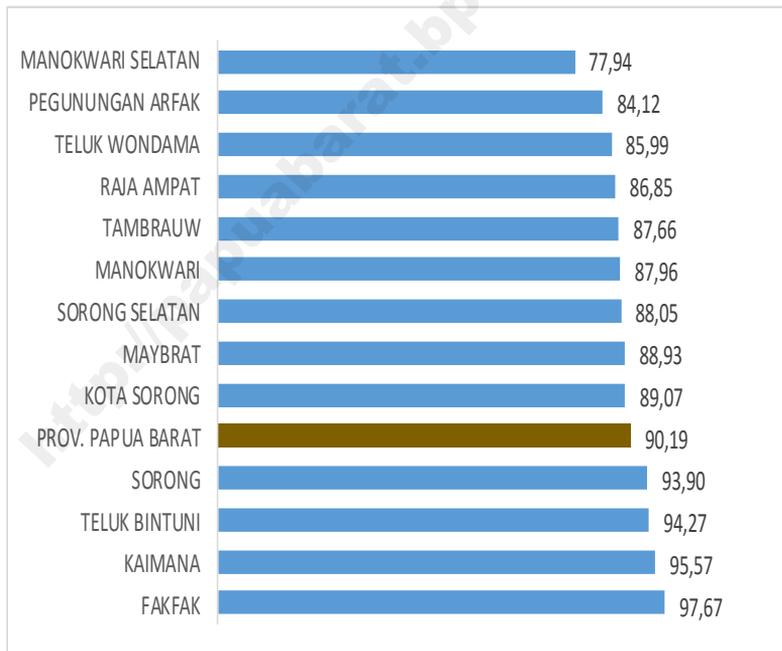
Gambar 2.3 menunjukkan cakupan layanan imunisasi pada anak berumur 12–23 bulan selama tahun 2011–2015. Ada dugaan yang patut diteliti lebih lanjut peningkatan kekhawatiran ibu yang memiliki bayi untuk memberikan imunisasi pada anaknya akibat pemberitaan negatif tentang efek negatif pemberian imunisasi pada anak sebagai akibat beredarnya vaksin imunisasi palsu.

Selain imunisasi, upaya meningkatkan ketahanan tubuh bayi adalah dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI pada anak balita merupakan pola asuh yang sangat dianjurkan. Bila kondisi kesehatan ibu setelah melahirkan baik, menyusui merupakan cara memberi makan yang paling ideal untuk 4-6 bulan pertama sejak dilahirkan tanpa



memberikan makanan tambahan, karena ASI dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi.

Gambar 2.4 menunjukkan pemberian ASI kepada bayi 0–23 bulan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015. Secara umum, pemberian ASI kepada bayi berumur 0–23 bulan di Papua Barat cukup baik. Selain Kabupaten Manokwari Selatan, pemberian ASI kepada bayi pada usia 0–23 bulan telah lebih dari 80 persen. Secara keseluruhan, persentase bayi 0–23 bulan yang mendapatkan ASI di Papua Barat mencapai 90 persen.



Gambar 2.4
Persentase Bayi 0–23 Bulan yang Mendapat ASI di Papua Barat
Tahun 2015



<http://papuabarat.bps.go.id>



Bab 3

Pendidikan

Provinsi Papua Barat telah memasuki pembangunan lima tahun kedua, yaitu periode tahun 2011–2015. Target dan sasaran misi pembangunan pada masa ini ditekankan pada upaya mencapai kemandirian wilayah. Salah satu upaya mencapai kemandirian tersebut melalui akses, layanan, dan kualitas pendidikan.

Ada tiga agenda penting dalam rangka mewujudkan kemandirian wilayah melalui akses, layanan, dan kualitas pendidikan. Pertama, mengejar kenaikan angka melek huruf sebesar 1% setiap tahunnya sehingga 100% penduduk Papua melek huruf. Kedua, pembangunan sekolah berpola asrama yang didukung program kemitraan pada minimal 15 distrik setiap tahunnya. Ketiga, setiap tahunnya dilakukan pembinaan tenaga pengajar di Papua Barat sebesar 20% dari total pengajar dan kemudian diberikan stimulus dana ataupun rekrutmen baru untuk disebarakan kedalam kampung-kampung terisolir secara merata dan bertahap (RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012–2016).

Pembahasan pada Bab 3 ini difokuskan pada capaian pembangunan pada sektor pendidikan di Provinsi Papua Barat. Beberapa indikator pendidikan digunakan untuk

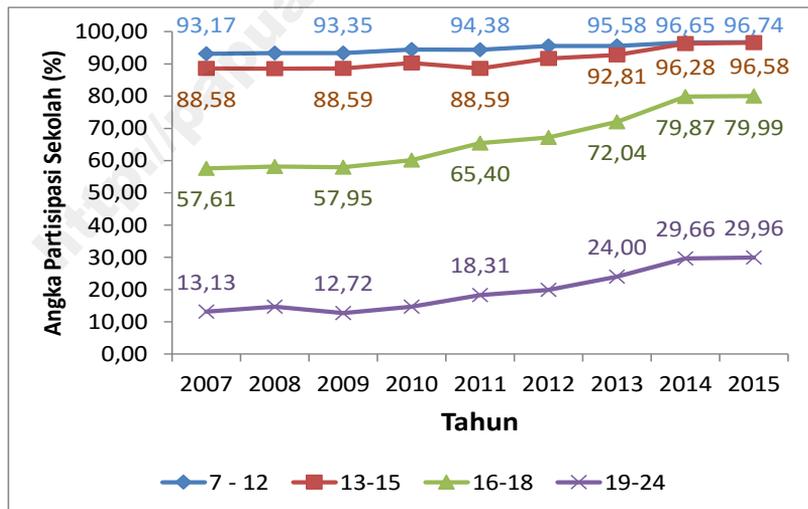


mengukur kinerja pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat seperti angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah mengukur persentase penduduk usia sekolah yang masih bersekolah. Indikator ini mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar. Berdasarkan Gambar 3.1, diperoleh bahwa pada tahun 2015 sebanyak 95,74 persen penduduk usia 7 - 12 tahun berstatus masih sekolah. APS untuk penduduk usia 16–18 tahun dan 19–24 tahun juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7–24 Tahun di Provinsi Papua Barat, Tahun 2007–2015



Sumber: BPS, Susenas 2007–2015



Perbedaan APS penduduk usia 7–12 tahun antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tidak berbeda nyata baik pada tahun 2014 maupun tahun 2015. Hal ini disebabkan jumlah sekolah dasar telah tersebar hampir merata di semua kabupaten/kota buah dari Program Wajib Belajar 6 Tahun yang dicanangkan sejak tahun 1984. Jumlah desa di Provinsi Papua Barat yang telah dilengkapi sekolah dasar hingga tahun 2014 sebanyak 835 desa dari 1.567 desa (BPS, Pendataan Potensi Desa 2014).

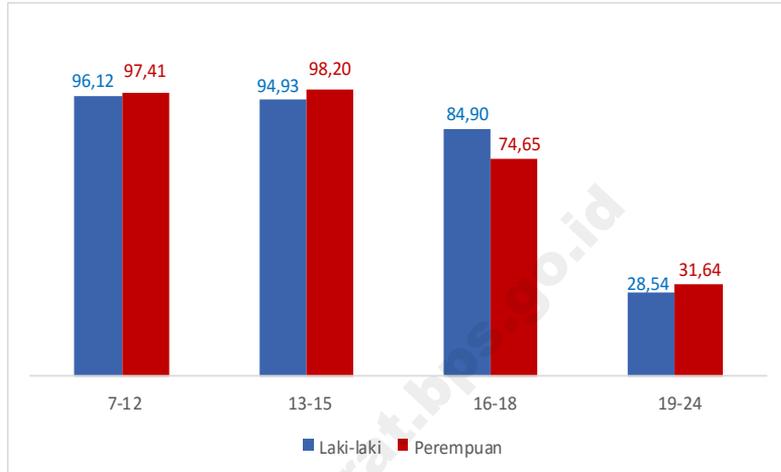
Seperti APS 7–12 tahun, capaian APS 13–15 tahun antar kabupaten/kota juga tidak berbeda. Program wajib belajar 6 tahun ditingkatkan menjadi 9 tahun pada tahun 1994. Sejak saat itu hingga tahun 2014, 233 desa telah dibangun gedung sekolah SMP di hampir semua distrik.

Perbedaan APS tampak nyata untuk penduduk usia 16–18 tahun dan 19–24 tahun. Lampiran III (2) menyajikan data APS menurut kabupaten/kota pada tahun 2014 dan 2015. Perbedaan APS pada kedua kelompok usia ini sangat dipengaruhi jumlah SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Masih mengacu pada hasil data Podes 2014, jumlah desa di Provinsi Papua Barat yang mempunyai SMA sebanyak 102 desa. Fasilitas pendidikan SMA/SMK/PT tersebut banyak terpusat di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Jumlah SMU di Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Tambrauw hanya ada satu unit.

Selain terdapat perbedaan antar kabupaten/kota, APS juga berbeda menurut jenis kelamin. Gambar 3.2 memperlihatkan bahwa pada kelompok umur 7–12 tahun, hampir tidak ada perbedaan partisipasi sekolah. Tetapi, pada kelompok umur 16–18 tahun, perbedaan partisipasi sekolah antara anak laki-



Gambar 3.2 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, Tahun 2015



Sumber: BPS, Susenas 2015

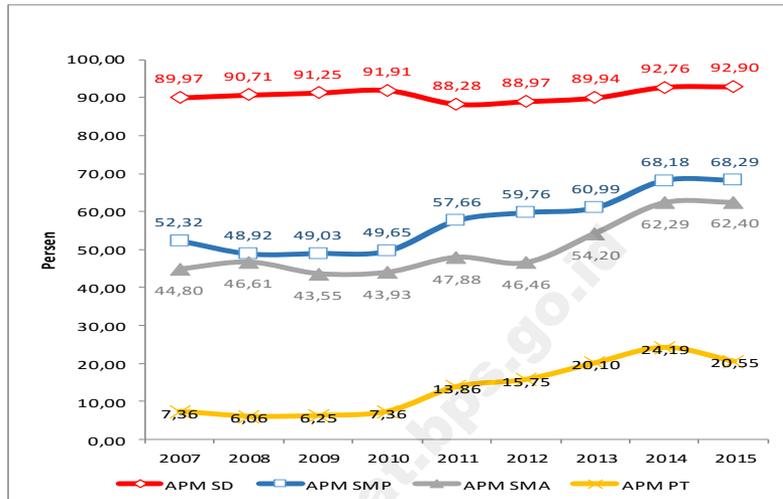
laki dan perempuan tampak nyata. Keterbatasan jumlah SMA dan PT berdampak pada partisipasi sekolah penduduk usia 16–24 tahun khususnya pada kaum perempuan.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Berbeda dengan APS, angka partisipasi murni (APM) mengukur partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sebagai contoh, APM SD mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 7–12 tahun yang masih bersekolah SD/ sederajat, APM SMP mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 13–15 tahun yang masih bersekolah SMP/ sederajat, dan seterusnya. APM menurut jenjang pendidikan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2007



Gambar 3.3 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2007-2015



Sumber: BPS, Susenas 2007–2015

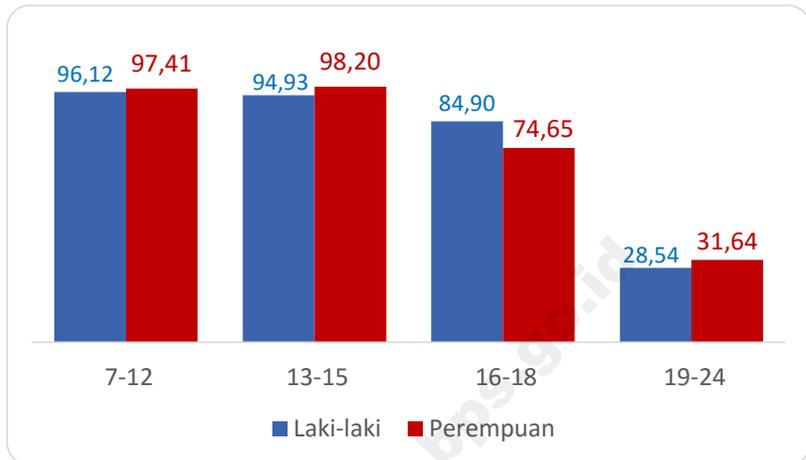
hingga 2015 dapat diamati pada Gambar 3.3. Sekilas tampak bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah APM.

Dikaitkan dengan target Pendidikan Untuk Semua-PUS (*Education for All-EFA*) di mana pada tahun 2015, semua anak mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan yang bermutu. Target nasional PUS adalah 100 persen APM pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk capaian APM SD, Provinsi Papua Barat hampir mencapai target nasional PUS tersebut hingga tahun 2015 tetapi tidak untuk APM SMP dan SMA.

Lampiran III (3) memperlihatkan capaian APM di tingkat kabupaten/kota untuk semua jenjang pendidikan. capaian APM SMP/ sederajat masih rendah dan terdapat perbedaan



Gambar 3.4 Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015



capaian antar wilayah yang cukup tinggi. Kabupaten Teluk Wondama merupakan kabupaten dengan capaian APM SMP/terendah yaitu 30,70 persen yaitu di Kabupaten Pegunungan Arfak. Sebaliknya, Kota Sorong merupakan wilayah dengan APM SMP tertinggi yaitu 75,55 persen.

Gambar 3.4 selanjutnya menunjukkan perbedaan APM antara anak laki-laki dan perempuan di jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Perbedaan yang cukup nyata pada APM SMP dan SMA di mana perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Harapan Lama Sekolah Dan Rata – Rata Lama Sekolah

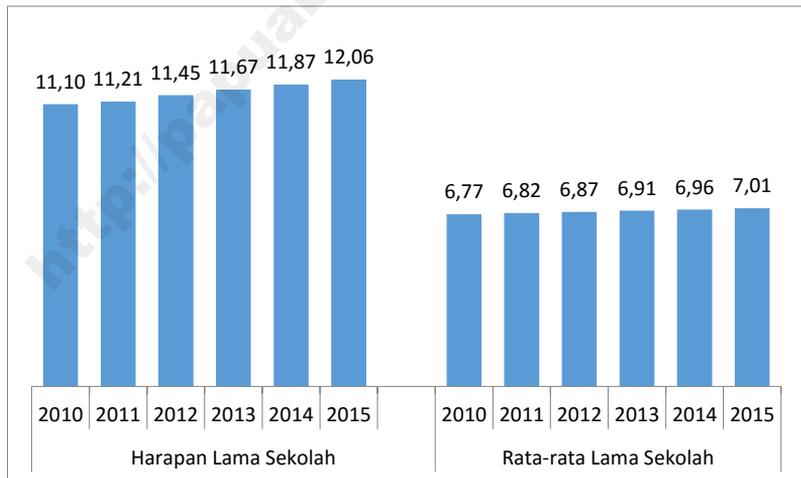
Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan dua indikator yang dijadikan sebagai komponen untuk mengukur pembangunan manusia metode baru dari aspek pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)



didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk bersekolah.

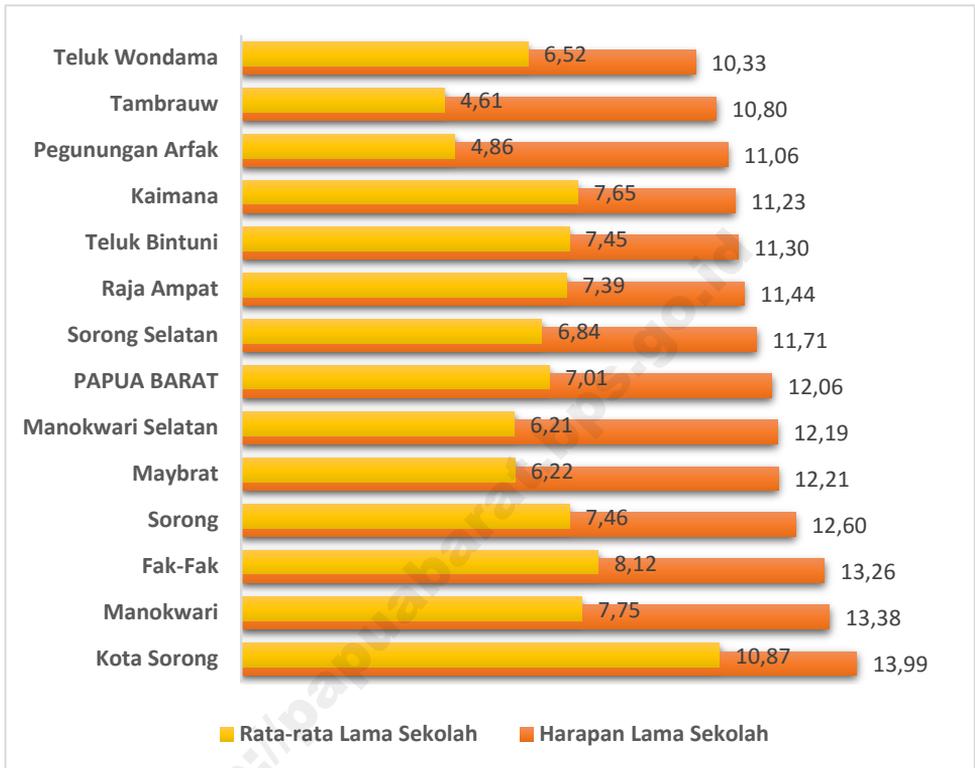
Gambar 3.5 menunjukkan bahwa, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tahun 2010 sampai dengan 2015 meningkat. Meski demikian, dapat dikatakan kesenjangan antara harapan lama sekolah dan realisasi rata-rata lama sekolah masih cukup senjang. Idealnya, harapan lama sekolah tidak berselisih jauh dengan rata-rata lama sekolah.

Gambar 3.5 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2015





Gambar 3.6 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015



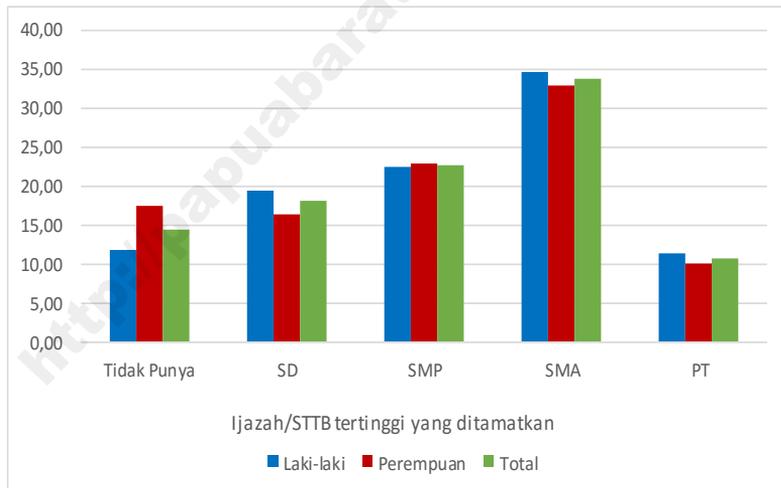
HLS dan RLS di tingkat kabupaten/kota sangat bervariasi. Gambar 3.6 menyajikan data HLS dan RLS di tingkat kabupaten/kota. Tampak bahwa, dari semua kabupaten/kota, gap antara HLS dan RLS di Kota Sorong paling sedikit. Sebaliknya, kesenjangan HLS dan RLS terbesar di Kabupaten Tambrau. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan antar kabupaten/kota di Papua Barat sangat timpang.



Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator output lain selain RLS dalam penyelenggaraan pendidikan. Gambar 3.6 memberikan gambaran tentang pencapaian pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2015. Gambar 3.7 tersebut mengindikasikan beberapa isu pendidikan sebagai berikut:

- a. Sebesar 14,46 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah SD. Hal ini mencerminkan, kualitas SDM dari aspek pendidikan di Papua Barat masih tergolong rendah. Hanya 10,83 Persen penduduk 15 tahun ke atas yang lulus dari perguruan tinggi.



Gambar 3.7 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun atau Lebih Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat Tahun 2015



- b. Ada kesenjangan penerimaan manfaat layanan pendidikan di antara laki-laki dan perempuan. Persentase perempuan tanpa ijazah lebih tinggi daripada laki-laki. Sebaliknya, persentase laki-laki dengan ijazah SMA dan PT lebih tinggi daripada perempuan.

<http://papuabarat.bps.go.id>



Bab 4

Ketenagakerjaan

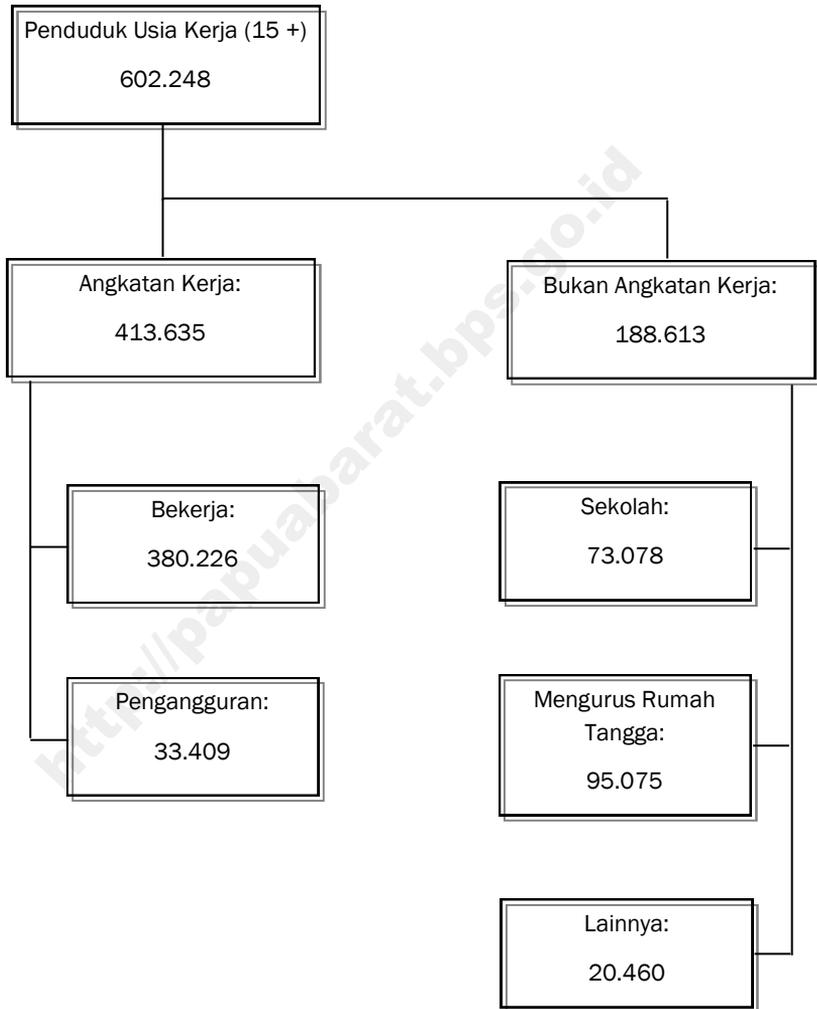
Pengamatan kondisi ketenagakerjaan dari waktu ke waktu penting dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan ketenagakerjaan di masa yang akan datang. Selain itu, pengukuran tingkat pengangguran telah dipilih sebagai salah satu indikator kunci pembangunan di Era Kabinet Kerja, 2015–2019. Bab 4 ini menyajikan beberapa indikator kunci ketenagakerjaan mulai dari struktur penduduk usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan.

Struktur Penduduk Usia Kerja Agustus 2015

Estimasi jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 sebanyak 602.248 jiwa. Penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja sebesar 69,68 persen, naik dari tahun sebelumnya yaitu 68,30 persen. Penduduk angkatan kerja yang bekerja sebesar 91,92 persen. Dengan kata lain, sekitar 8,08 persen penduduk angkatan kerja pada tahun 2015 termasuk sebagai kelompok pengangguran terbuka. Dibanding tahun 2014, pengangguran terbuka naik (Tabel 4.1).



Gambar 4.1 Struktur Penduduk Usia Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus Tahun 2015





Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012–2015

Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Agustus)				Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan	64,61	62,25	62,71	63,60	10,28	10,32	8,23	14,01
Perdesaan	68,20	68,26	70,57	72,01	3,55	2,31	3,86	4,64
Total	67,12	66,41	68,30	68,68	5,49	4,62	5,02	8,08

Sumber: BPS, Sakernas 2012–2015

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran dengan jumlah penduduk usia kerja. TPAK selama tahun 2015 naik dibandingkan dengan TPAK tahun 2014. Selain itu, penduduk usia kerja yang masuk dalam pasar kerja sedikit berkurang. Hal ini ditunjukkan dengan sedikit tambahan penduduk angkatan kerja yang tidak terserap oleh dunia kerja.

Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, TPAK perdesaan lebih besar dibandingkan TPAK perkotaan. Salah satu penyebabnya adalah akses pendidikan di pedesaan lebih sulit daripada di perkotaan. Akibatnya, penduduk usia sekolah di perdesaan lebih banyak tergolong sebagai penduduk angkatan kerja. Sebaliknya, di perkotaan banyak yang termasuk bukan angkatan kerja. Selain itu, banyak angkatan kerja di perdesaan tergolong sebagai pekerja meskipun dengan status pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan banyaknya angkatan kerja yang menganggur. Mereka yang tergolong pengangguran yaitu penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja atau mempersiapkan suatu usaha, dan mereka yang sementara belum mulai kerja walau sudah mendapat pekerjaan dan mereka yang tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Semakin banyak angkatan kerja yang berstatus pengangguran, maka semakin tinggi TPT.

TPT di Provinsi Papua Barat untuk kondisi Agustus 2015 sebesar 8,08 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan TPT tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,02 persen. Tingkat pengangguran di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan.

TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan angkatan kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar TPT. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa TPT dari angkatan kerja dengan pendidikan SMP ke bawah lebih rendah daripada TPT dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan minimal SMA. Puncak TPT tertinggi pada kelompok pendidikan SLTA/ sederajat. Pada tahun sebelumnya, puncak TPT berada pada kelompok angkatan kerja berpendidikan Perguruan Tinggi. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan rendah jauh lebih mudah terserap dalam lapangan pekerjaan daripada mereka yang berpendidikan tinggi.

Lebih ekstrim lagi jika TPT per tingkat pendidikan dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.



Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013-2015

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Perkotaan			Perdesaan			Kota + Desa		
	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2013 (5)	2014 (6)	2015 (7)	2013 (8)	2014 (9)	2015 (10)
Tdk Sekolah/Blim Tamat SD	9,02	0,40	0,21	0,56	0,83	0,31	1,38	0,79	0,27
Tamat SD/Sederajat	3,75	1,74	0,13	1,64	1,18	0,72	1,94	1,27	0,51
Tamat SLTP/Sederajat	7,70	7,76	0,77	1,62	2,36	0,29	3,54	3,69	0,45
Tamat SLTA/Sederajat	14,20	10,94	11,54	4,14	7,44	2,62	8,23	8,76	5,68
Tamat Perguruan Tinggi	8,20	12,68	3,65	4,81	12,93	0,93	6,42	12,82	1,86
Total	10,32	8,97	16,29	2,31	4,01	4,86	4,62	5,28	8,79

Sumber: BPS, Sakernas 2013—2015



Semakin jelas bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap angkatan kerja di perkotaan tidak sekuat di perdesaan.

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Gambaran ketenagakerjaan berdasarkan sektor/lapangan usaha dari tahun 2011 – 2015 menjelaskan terjadinya pergeseran struktur lapangan pekerjaan di Papua Barat. Sektor pertanian semakin menurun karena semakin ditinggalkan angkatan kerja yang lebih memilih sektor Industri (*manufacture*) dan Jasa-jasa (*services*). Persentase angkatan kerja yang bekerja pada kedua sektor terakhir semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ciri-ciri terjadinya urbanisasi ketika sektor industri dan jasa semakin diminati para pencari kerja. Selama pertanian terus menjadi sektor yang subsisten dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan

Tabel 4.3 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011-2015

Tahun	Lapangan Usaha		
	Pertanian	Industri	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	48,48	10,98	40,54
2012	47,22	13,21	39,57
2013	48,71	10,25	41,04
2014	45,28	12,37	42,35
2015	42,11	10,57	47,32

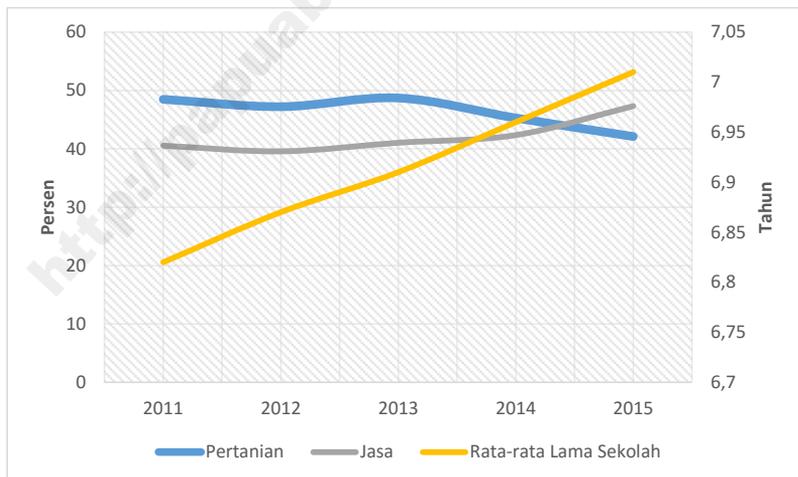
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat 2011–2015



sektor lain maka pertanian akan semakin ditinggalkan. Mereka yang memasuki sektor pertanian adalah mereka yang tidak punya kesempatan masuk ke sektor industri dan jasa-jasa dan kalah bersaing dengan pencari kerja lain yang lebih berkualitas.

Sampai dengan tahun 2014, sektor pertanian masih menjadi primadona penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat. Perkembangan serapan tenaga kerja di sektor pertanian terus turun sebaliknya perkembangan serapan tenaga kerja di sektor jasa terus meningkat. Pada tahun 2015, proporsi tenaga kerja yang terserap di sektor jasa telah melampaui serapan tenaga kerja di sektor pertanian.

Peningkatan serapan tenaga kerja di sektor jasa tidak dapat dipisahkan dari peningkatan capaian pendidikan di Provinsi Papua Barat. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua Barat



Gambar 4.2 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Atau Lebih di Provinsi Papua Barat Tahun 2015



meningkat dari 6,82 tahun pada tahun 2011 menjadi 7,01 tahun pada tahun 2015.

Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Salah satu pengelompokan status pekerjaan utama adalah dengan mengelompokkan pekerja ke dalam sektor informal atau formal. Pekerja di sektor informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar atau pekerja keluarga, pekerja bebas, atau pekerja keluarga. Pekerja di sektor formal adalah penduduk yang bekerja dengan status sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

Secara umum terlihat bahwa pekerja di Papua Barat lebih dominan bekerja di sektor informal. Persentase pekerja di sektor informal mencapai 57,56 persen pada tahun 2014 berkurang menjadi 55,63 persen pada tahun 2015. (Tabel 4.4). Persentase pekerja formal di perkotaan dua kali lebih besar dibandingkan di perdesaan.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2014-2015

Status Pekerjaan	Perkotaan		Perdesaan		Kota dan Desa	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)
Formal	60,45	59,76	29,70	28,84	42,44	44,37
Informal	39,55	40,24	70,30	71,16	57,56	55,63

Sumber: BPS, Sakernas 2014–2015



Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

Meskipun partisipasi angkatan kerja meningkat selama tahun 2012 sd 2015 tetapi kesempatan berkurang. Di sisi lain, 32,87 persen angkatan kerja yang bekerja menghabiskan waktu kerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu. Dengan kata lain, masih ditemukan setengah pengangguran yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam 35 jam seminggu. Informasi setengah pengangguran ini disajikan pada Tabel 4.5 pada kolom (5) sampai dengan kolom (7) yang menyajikan setengah pengangguran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Tampak bahwa penurunan setengah pengangguran terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 4.5 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013-2015

Daerah Tempat Tinggal	Jam Kerja					
	< 15 jam			< 35 jam		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	8,52	2,61	3,48	24,76	20,21	21,33
Perdesaan	9,05	5,18	3,35	48,83	39,69	38,90
Perkotaan + Perdesaan	8,91	4,52	3,39	42,3	34,69	32,87

Sumber: BPS, Sakernas 2013–2015



<http://papuabarat.bps.go.id>



Bab 5

Taraf dan Pola Konsumsi

Agenda pokok keempat pembangunan Papua Barat adalah penanggulangan kemiskinan. Penurunan persentase penduduk miskin dapat dimaknai adanya peningkatan tingkat pendapatan penduduk yang juga menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraannya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah peningkatan tingkat pendapatan tersebut telah dinikmati oleh semua penduduk secara merata atau hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Pembahasan bab ini mengulas jawaban permasalahan tersebut dengan mengkaji bagaimana taraf dan pola konsumsi sebagai proksi dari taraf dan pola pendapatan penduduk Papua Barat.

Perkembangan Kemiskinan di Papua Barat, 2006 - 2016

Mollie Orshansky, seorang ekonom dan statistisi Amerika pada tahun 1963–1965 mengembangkan Garis Kemiskinan Orshansky. Beliau menyatakan, *“Unlike some other calculations, those relating to poverty have no intrinsic value of their own. They exist only in order to help us make them disappear from the scene...With imagination, faith and hope, we might succeed in wiping out the scourge of poverty even if we don't agree on how to measure it.”*



Tabel 5.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat Menurut Daerah, 2006 – 2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006	13,3	270,80	284,10	8,42	51,17	41,34
2007	11,0	255,80	266,80	7,14	48,82	39,31
2008	9,48	237,02	246,50	5,93	43,74	35,12
2009	8,55	248,29	256,84	5,22	44,71	35,71
2010	9,59	246,66	256,25	5,73	43,48	34,88
2011	10,78	239,06	249,84	6,05	39,56	31,92
2012	13,99	216,00	229,99	5,76	37,73	28,20
2013	14,21	210,06	224,27	5,65	35,64	26,67
2014	14,78	214,65	229,43	5,86	36,16	27,13
2015	19,34	206,03	225,36	5,86	37,97	25,82
2016	20,96	204,85	225,80	6,14	37,48	25,43

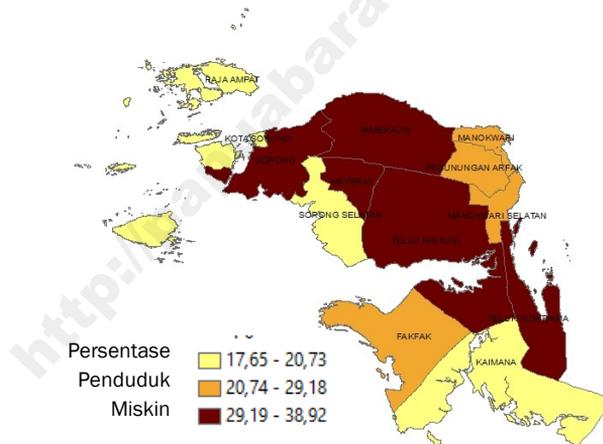
Sumber: BPS, 2006–2015

BPS menggunakan pendekatan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk menghitung kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Provinsi Papua Barat pada Maret 2016 sebesar Rp. 474.967,- terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar Rp. 372.548,- dan garis kemiskinan non makanan sebesar 102.419,-. Dengan garis kemiskinan tersebut, penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pada Maret 2016 sebesar 25,43 persen atau sebanyak



225,800 jiwa dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di perdesaan yaitu sebesar 204.850 ribu jiwa.

Masalah lain dari penanggulangan kemiskinan di Papua Barat adalah perbedaan persentase penduduk miskin antar kabupaten kota yang terlalu besar. Gambar 5.1 memetakan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Papua Barat tahun 2014. Kemiskinan di Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Tambrau cukup tinggi. Di sisi lain, kemiskinan di Kabupaten Kaimana dan Kota Sorong di bawah 20 persen. Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Manokwari berada pada level kemiskinan yang sama.



Gambar 5.1 Sebaran Penduduk Miskin di Papua Barat Tahun 2014.



Perkembangan Tingkat Kesejahteraan

Penurunan persentase penduduk miskin mengindikasikan peningkatan pendapatan penduduk sehingga mampu melewati batas garis kemiskinan. Tingkat pendapatan penduduk didekati dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Selama tahun 2010–2015, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di Provinsi Papua Barat meningkat dari Rp. 601.279,- pada tahun 2010 menjadi Rp. 906.477,- pada tahun 2014 dan menjadi Rp. 1.030.232,- pada tahun 2015. Peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita ini mengindikasikan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Tabel 5.2 memperlihatkan bahwa pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2014–2015 mencapai 13,65 persen.

Tabel 5.2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011–2015

Tahun	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan	Kenaikan Nominal Per Tahun (%)
(1)	(2)	(3)
2011	691.933	17,95
2012	816.137	7,36
2013	876.253	3,45
2014	906.477	13,65
2015	1.030.232	



Gambar 5.2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015

Gambar 5.2 memperlihatkan pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2015. Tampak bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi di Kabupaten Teluk Bintuni dan terendah di Kabupaten Pegunungan Arfak. Perbedaan rata-rata pengeluaran per kapita di kabupaten/kota di Papua Barat membuktikan bahwa ada isu kesenjangan penerima manfaat pembangunan antar wilayah terisolir dengan wilayah termaju.

Perkembangan Distribusi Pendapatan

Idealnya, hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan. Ukuran tingkat pemerataan digunakan untuk mengukur seberapa adil “kue pembangunan” dinikmati oleh semua penduduk.



Dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan adalah Koefisien Gini dan Tingkat Pemerataan Menurut Bank Dunia. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk. Nilai koefisien gini antara nol, untuk pemerataan sempurna, dan satu, untuk ketimpangan parah.

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Apabila persentasenya kurang dari 12 persen maka termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi; antara 12–17 persen kategori ketimpangan sedang; dan lebih dari 17 persen kategori ketimpangan rendah.

Tabel 5.3 menyajikan kedua ukuran ketimpangan pendapatan. Koefisien gini pada tahun 2007 sebesar 0,33 naik menjadi 0,35 pada tahun 2009 dan pada tahun 2015 menjadi 0,44. Pada tahun 2016 koefisien gini Papua Barat kembali turun menjadi 0,37. Kendati demikian tingkat ketimpangan pengeluaran di Papua Barat tergolong ketimpangan sedang.

Dilihat dari tingkat pemerataan menurut Bank Dunia, sampai dengan tahun 2012, Provinsi Papua Barat masih dalam kategori ketimpangan rendah. Proporsi pengeluaran dari



Tabel 5.3 Ukuran Tingkat Pemerataan Pendapatan di Provinsi Papua Barat Menurut Bank Dunia dan Koefisien Gini, Tahun 2007 – 2016

Tahun	Tingkat Kemerataan Menurut Bank Dunia			Gini Ratio
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	28,29	44,59	27,13	0,33
2008	29,61	43,09	27,30	0,36
2009	22,75	41,11	36,14	0,35
2010	19,14	37,70	43,15	0,37
2011	18,76	38,24	43,00	0,39
2012	18,86	39,68	41,46	0,42
2013	16,03	35,60	48,38	0,41
2014	16,13	34,94	48,93	0,42
2015	15,13	34,83	50,03	0,44
2016	16,36	40,69	42,94	0,37

Sumber: BPS, Susenas 2007–2016

kelompok penduduk 40 persen terbawah terhadap total pengeluaran seluruh penduduk masih di atas 17 persen. Namun sejak tahun 2013, proporsi pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terbawah mulai mengkhawatirkan. Kontribusinya, mulai di bawah 17 persen yang menandai pergeseran ketimpangan pendapatan dari ketimpangan rendah menjadi ketimpangan sedang. Pada tahun 2016, ada indikasi awal bahwa ketimpangan pengeluaran di Papua Barat menipis.



Konsumsi Rumah Tangga

Struktur konsumsi rumah tangga memberikan informasi penting terkait komposisi pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Secara umum, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi konsumsi makanan dan konsumsi non makanan. Rumah tangga dengan taraf kesejahteraan yang lebih baik akan lebih banyak mengalokasikan pengeluarannya untuk kebutuhan non makanan penting seperti pendidikan dan

Tabel 5.4 Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013 – 2015

Kabupaten/Kota	Makanan			Non Makanan		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	48,54	52,25	59,04	51,46	47,75	40,96
Kaimana	56,24	57,43	52,06	43,76	42,57	47,94
Teluk Wondama	63,76	58,20	54,80	36,24	41,80	45,20
Teluk Bintuni	54,69	54,08	46,39	45,31	45,92	53,61
Manokwari	45,45	45,20	44,63	54,55	54,80	55,37
Sorong Selatan	62,23	52,69	72,13	37,77	47,31	27,87
Sorong	59,30	57,13	49,02	40,70	42,87	50,98
Raja Ampat	54,79	57,37	51,09	45,21	42,63	48,91
Tambrau	75,20	67,82	67,28	24,80	32,18	32,72
Manokwari Selatan			60,20			39,80
Pegunungan Arfak			62,70			37,30
Maybrat	64,56	66,04	88,69	35,44	33,96	11,31
Kota Sorong	41,93	40,90	45,84	58,07	59,10	54,16
Prov. Papua Barat	49,18	48,73	49,77	50,82	51,27	50,23

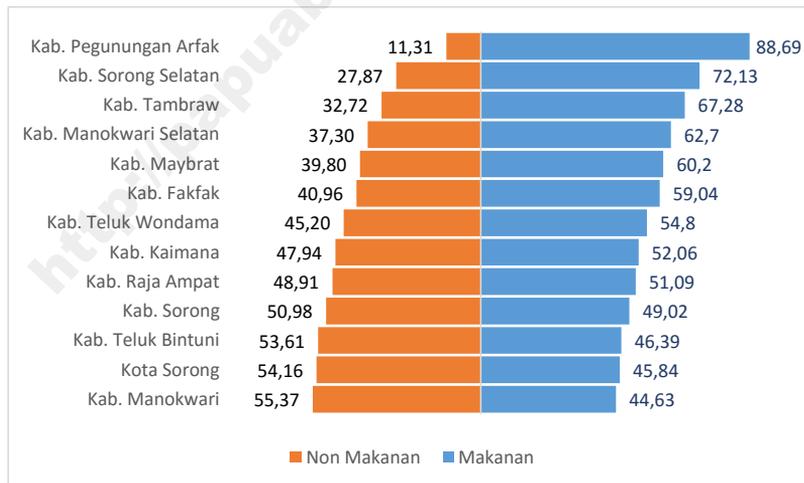
Sumber: BPS, Susenas 2013–2015



kesehatan.

Tabel 5.4 menyajikan komposisi pengeluaran konsumsi rumah tangga menurut makanan dan non makanan di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2013–2015. Secara umum, pengeluaran non makanan di Papua Barat lebih tinggi daripada pengeluaran makanan meskipun perbedaannya cukup kecil.

Terdapat perbedaan komposisi pengeluaran rumah tangga antara Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong dengan kabupaten lain di Provinsi Papua Barat. Komposisi pengeluaran rumah tangga di keempat wilayah tersebut didominasi oleh pengeluaran non makanan sebaliknya di kabupaten lain didominasi oleh pengeluaran makanan.



Gambar 5.3 Persentase Komposisi Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015



<http://papuabarat.bps.go.id>

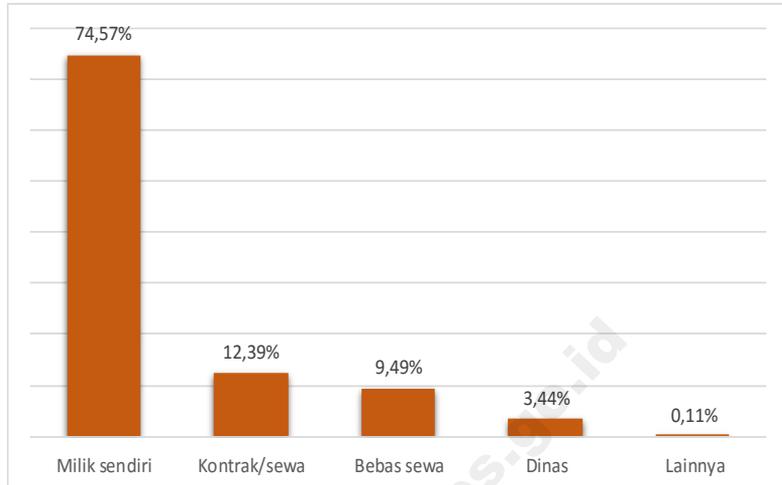


Bab 6

Perumahan dan Lingkungan

Hak warga negara untuk bertempat tinggal telah diatur baik dalam UUD 1945 maupun undang—undang. UUD 1945 Pasal 28H menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Bab III Perumahan Pasal 5 selanjutnya menegaskan bahwa, “Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati, menikmati, atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat aman, serasi dan teratur.” Dengan demikian, hak bertempat tinggal bagi warga negara sesungguhnya telah dinaungi payung hukum yang paling tinggi.

Idealnya, negara wajib memenuhi hak warga negaranya untuk menempati, menikmati, atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat aman, serasi dan teratur. Namun, karena kecepatan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi belum dapat diimbangi oleh kemampuan penyediaan perumahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai maka belum semua penduduk memiliki rumah sendiri.



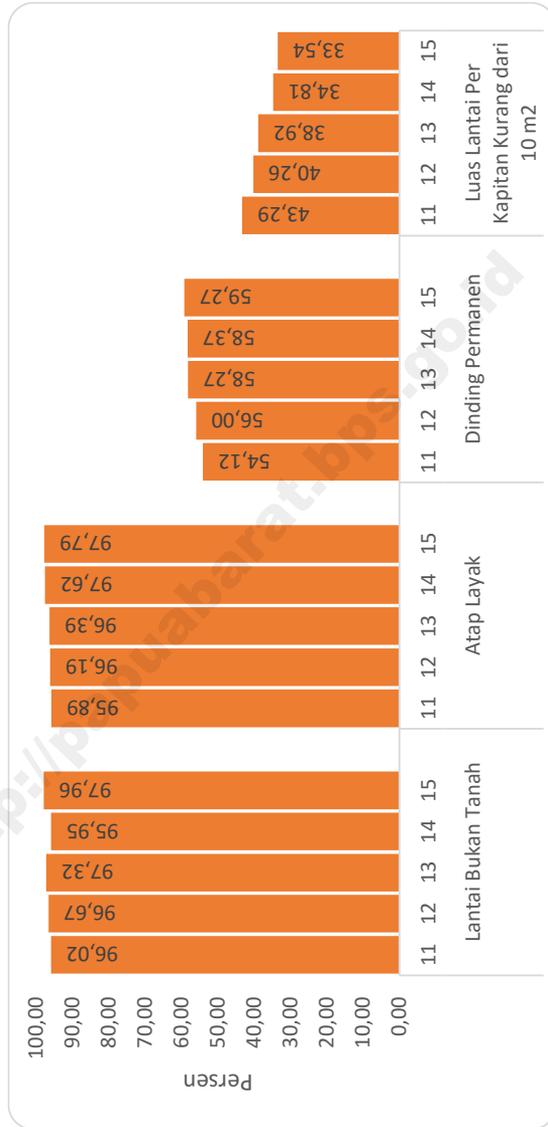
Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Papua Barat Tahun 2015

Susenas 2015 menunjukkan sebagian besar rumah tangga tinggal di rumah sendiri. Sisanya, masih kontrak/sewa, tinggal dengan status bebas sewa atau di rumah dinas. Sebagian besar, status bangunan tempat tinggal dari rumah milik sendiri tersebut adalah hak milik. Hanya 4,43 persen bangunan tempat tinggal berstatus hak pakai.

Berdasarkan empat indikator rumah layak huni pada tahun 2011–2015 menunjukkan adanya perbaikan kualitas perumahan di Provinsi Papua Barat. Gambar 6.2 memperlihatkan persentase rumah tangga dengan lantai bukan tanah, atap layak, dan dinding permanen meningkat sementara rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 10 m² menurun.



Gambar 6.2 Kondisi Perumahan Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011–2015



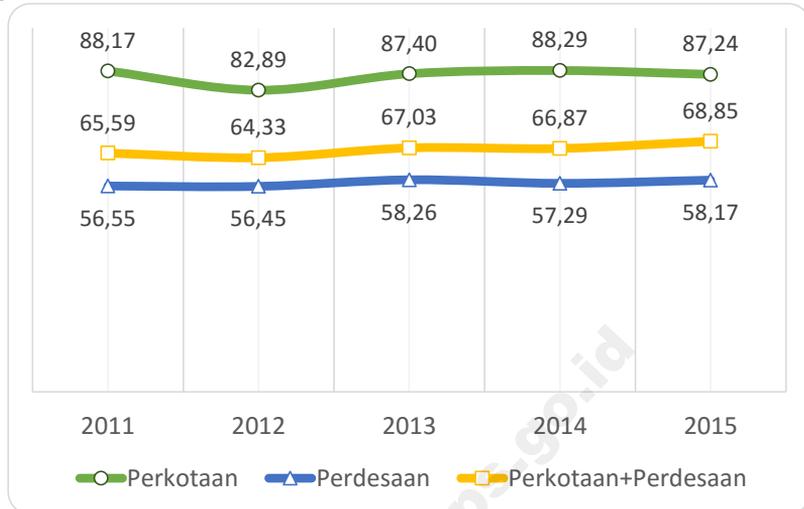


Air Minum Layak

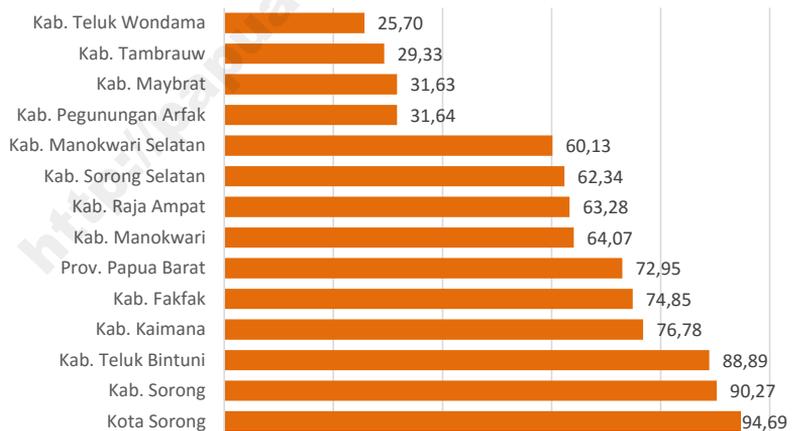
Sumber air minum digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu sumber air minum layak dan tidak layak. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air yang jaraknya ke tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase. Air kemasan dianggap sebagai sumber air minum layak hanya jika rumah tangga yang bersangkutan menggunakannya untuk memasak dan menjaga kebersihan tubuh, dan di Indonesia penggunaan air kemasan tidak dikategorikan sebagai sumber air minum layak karena aspek keberlanjutannya.

Gambar 6.3 menyajikan perkembangan akses rumah tangga terhadap air minum yang layak selama tahun 2011 hingga tahun 2015. Secara umum, akses rumah tangga terhadap air minum yang layak mengalami peningkatan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Penduduk semakin bertambah dan kebutuhan air minum juga semakin meningkat.



Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011 – 2015



Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2015



Sejak tahun 2014, penghitungan indikator air minum layak disempurnakan. Sebelumnya, sumber air minum layak hanya berasal dari air ledeng dan air dari sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke penampungan kotoran lebih dari 10 m dan air hujan, kini kriteria tersebut ditambah dengan penggunaan air mandi/cuci yang bersumber dari air terlindung (leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan) bila sumber air minum utama menggunakan air kemasan/isi ulang dan air tidak terlindungi (air terlindungi dengan jarak < 10 m dan air tidak terlindungi).

Akibat penyempurnaan penghitungan indikator sumber air minum layak tersebut, pola akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Sebesar 87,24 persen rumah tangga di perkotaan dapat mengakses sumber air minum layak sementara di perdesaan hanya 58,17 persen.

Akses air minum layak berbeda antar kabupaten/kota. Gambar 6.4 memperlihatkan persentase rumah tangga dengan akses terhadap air layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Tampak bahwa akses air minum layak di Kabupaten Teluk Tambrauw paling rendah dan di Kota Sorong paling tinggi.

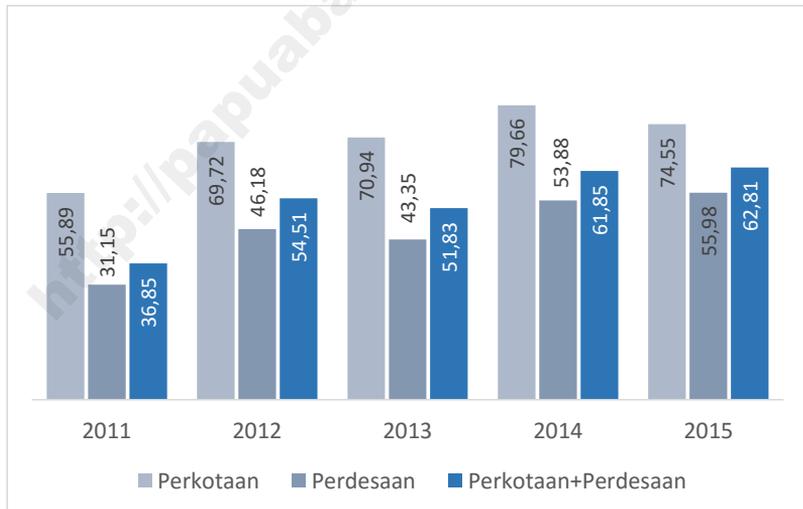
Sanitasi Layak

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia (Bappenas, 2010). Fasilitas sanitasi yang



layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

Perkembangan persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Papua Barat mengalami peningkatan. Gambar 6.5 menunjukkan bahwa selama tahun 2011–2015, peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perkotaan. Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak di daerah perdesaan meningkat dari 36,85 persen pada tahun 2011



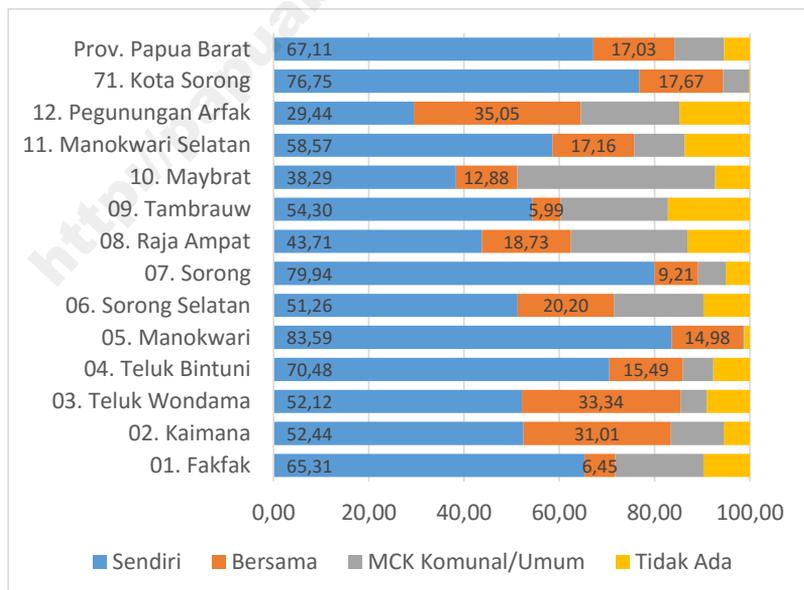
Gambar 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Sanitasi yang Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011 – 2015



menjadi 62,81 persen pada tahun 2015. Proyek MCK dari PNPM Pedesaan turut berkontribusi terhadap pesatnya peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di pedesaan.

Selain terdapat perbedaan akses terhadap sanitasi yang layak di daerah perkotaan dan pedesaan, perbedaan akses terhadap sanitasi yang layak juga berbeda antar kabupaten/kota. Gambar 6.6 memperlihatkan akses rumah tangga terhadap keberadaan fasilitas BAB menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2015. Tampak bahwa 35,05 persen rumah tangga di Kabupaten Pegunungan Arfak memanfaatkan tempat BAB bersama dan 14,78 persennya tidak memiliki fasilitas tempat BAB.

Gambar 6.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas BAB dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2015



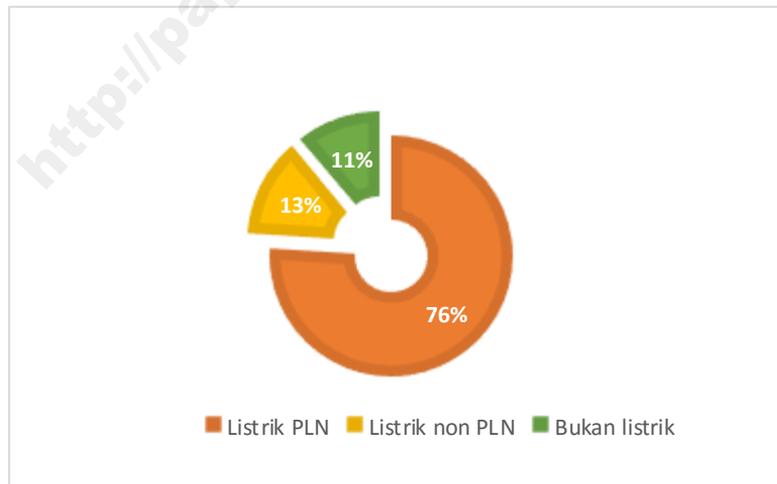


Penerangan

Kriteria selanjutnya yang digunakan dalam mengamati kondisi perumahan di Papua Barat adalah fasilitas penerangan. Penerangan menjadi sarana pendukung anggota rumah tangga dalam melakukan aktifitas sehari-hari di rumah. Pemakaian listrik sebagai sumber penerangan juga dapat menjadi indikasi besarnya akses rumah tangga terhadap informasi khususnya melalui media elektronik.

Sumber penerangan listrik di Papua Barat belum dapat sepenuhnya diusahakan oleh PLN. Akses listrik PLN baru mencapai 69 persen pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 76 persen pada tahun 2015. Masih ada 11 persen rumah tangga dengan sumber penerangan utama bukan listrik dan 13 persen sisanya mengandalkan listrik non PLN seperti

Gambar 6.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2015





Genset untuk sumber penerangan utama.

Di beberapa tempat, pemakaian solar cell untuk penerangan cukup umum. Seperti di Wasior misalnya, beberapa rumah tangga memasang panel solar cell untuk kebutuhan penerangan dan penggunaan alat elektronik seperti televisi. Di Daerah Tanggaromi Kabupaten Kaimana, penduduk memanfaatkan bantuan solar cell dari pemerintah daerah untuk penggunaan dua atau tiga lampu.

<http://papuabarat.bps.go.id>



Bab 7

Sosial Lainnya

Bab ini menerangkan perlindungan sosial yang dimiliki oleh masing-masing anggota rumah tangga maupun oleh rumah tangga serta kepemilikan aset dan jaminan terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Keterangan yang dicakup pada bab ini meliputi penyaluran beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), aset, jaminan kebutuhan sehari-hari, kredit usaha, beasiswa dan bantuan pendidikan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan veteran, asuransi kecelakaan kerja, pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan jaminan pembiayaan/asuransikesehatan.

Program Penanggulangan Kemiskinan

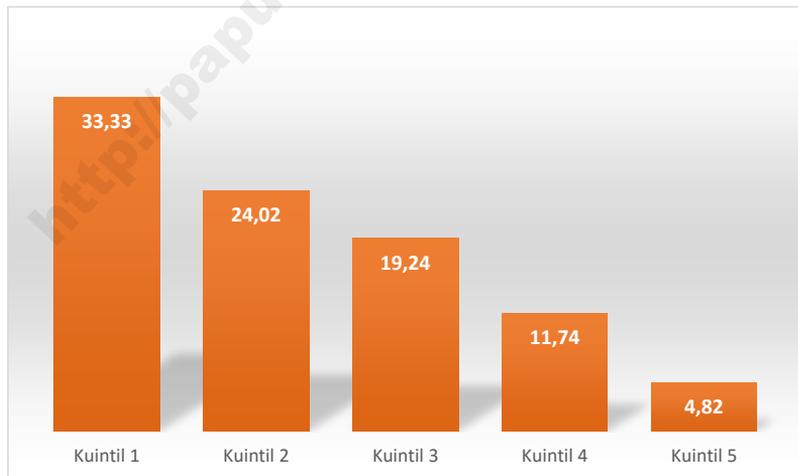
Pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan mencakup dua sasaran. Pertama, mengurangi beban rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar dan meningkatkan pendapatannya. Pengurangan beban rumah tangga miskin antara lain melalui program raskin, asuransi kesehatan penerima bantuan iuran (PBI-BPJS), bantuan siswa miskin, program keluarga harapan. Pemberian kredit untuk usaha merupakan bagian dari upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin.



7.1 Pembagian Beras Miskin

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Raskin 2015, beras miskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Secara nasional, sasaran program Raskin Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 rumah tangga sasaran (RTS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan. Adapun harga tebus raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,- / kg di titik distribusi (TD).

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Miskin di Provinsi Papua Barat Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2015)



Gambar 7.1 memperlihatkan program pemberian beras miskin di Provinsi Papua Barat tahun 2014. Tampak bahwa bukan hanya golongan pengeluaran rendah saja yang memperoleh beras miskin tetapi golongan pengeluaran teratas juga menikmati pembagian beras miskin. Penerima beras miskin pada kelompok pengeluaran 20 persen terendah mencapai 58 persen dan pada kelompok 20 persen teratas mencapai 15 persen. Idealnya, penerima beras miskin hanya untuk 25 persen penduduk berpengeluaran terendah.

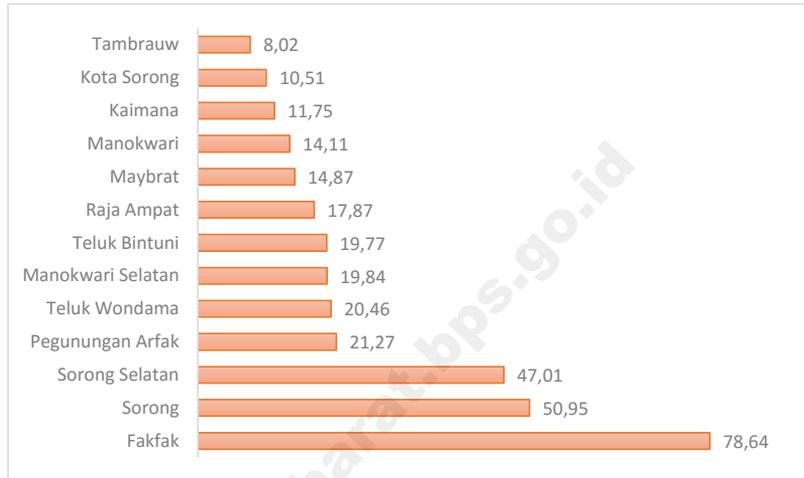
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kinerja pengelolaan beras miskin di 10 provinsi di Indonesia. Provinsi Papua Barat adalah salah satu dari 10 provinsi selain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPS tersebut, terdapat 196 desa/kelurahan di 50 kabupaten/kota yang tidak melakukan pemutakhiran data, sehingga penerima program raskin beresiko tidak tepat sasaran (www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/04/29/nnk4dh-pembagian0raskin-tak-tepat-sasaran-ini-alasannya).

Pola penyebaran beras miskin di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat cukup beragam. Lebih dari 90 persen penyaluran beras miskin di dua kabupaten yaitu Sorong dan Fakfak diterima oleh rumah tangga tergolong 20 pengeluaran terbawah. Sebaliknya, persentase rumah tangga penerima beras miskin di Kabupaten Tambrauw pada kelompok 20 persen terbawah hanya 24 persen (Gambar 7.2).

Masalah lain dari penyaluran beras miskin adalah terkait waktu penyalurannya. Hingga saat ini, penyaluran beras miskin masih bersifat “rapel” dalam arti jatah beras miskin



Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga pada Kelompok 40 % Pengeluaran Terendah yang Membeli/Menerima Beras Miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015



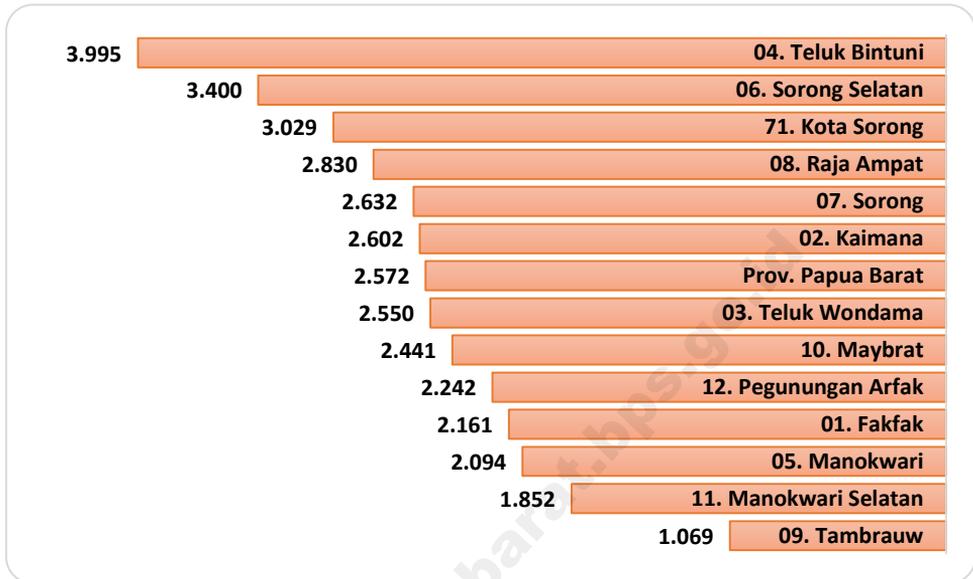
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2015)

beberapa bulan diterima sekaligus pada bulan tertentu. Ada rumah tangga yang membeli beras miskin kurang dari 15 kg untuk satu bulan, ada juga rumah tangga yang membeli beras miskin lebih dari 15 kg untuk satu bulan. Sekitar 13 dari 100 rumah tangga di Provinsi Papua Barat yang membeli beras miskin sebesar 15 kg untuk satu bulan.

Jika dikaji lebih jauh, ada empat alasan utama rumah tangga menerima beras miskin kurang dari 15 kg. Sebanyak 82 dari 100 rumah tangga menyatakan bahwa ada ketentuan musyawarah desa/dusun yang mengharuskan penerimaan beras miskin diterima sekaligus. Akibatnya, ada bulan-bulan tertentu yang tidak menerima beras miskin sama sekali. Selain itu, rumah tangga lain membeli beras miskin kurang



Gambar 7.3 Rata-rata Harga Beras Miskin Per Kg Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2015)

dari 15 kg karena tidak mempunyai cukup uang dan ada juga yang membeli beras miskin seperlunya.

Harga beras miskin sesungguhnya sudah diatur dalam pedoman umum penyaluran beras miskin yaitu seharga Rp. 1.600,- per kg. Namun, rata-rata harga beras miskin di Papua Barat sekitar Rp. 2.000,- per kg.

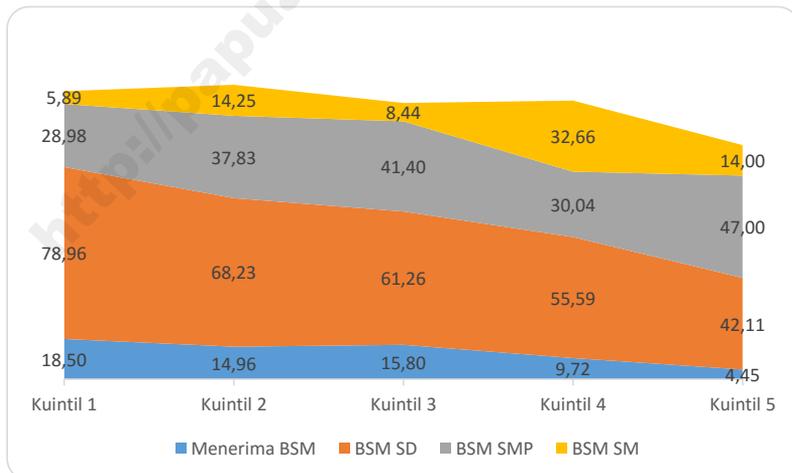
7.2 Bantuan Siswa Miskin

Selain program beras miskin, program bantuan siswa miskin atau BSM juga merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan melalui program perlindungan sosial. BSM



mencakup 34 provinsi, 114 kabupaten/kota dan 1.114 sekolah. BSM digulirkan mengingat angka drop out masyarakat miskin baik antar jenjang kelas maupun antar jenjang pendidikan sangat tinggi. Karena itu, sasaran penerima BSM adalah anak sekolah dari rumah tangga pada kelompok 25 % pengeluaran terendah. Cakupan tersebut meliputi 11,1 juta anak sekolah pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Besaran bantuan yang akan diberikan untuk tahun ajaran 2014/2015 bagi tingkat SD/MI sebesar Rp 450.000/semester, SMP/MTs Rp 750.000/semester dan SMA/SMK/MA Rp 1.000.000/semester.

Gambar 7.4 menyatakan persentase rumah tangga yang salah satu anggotanya menerima BSM SD dan SMP dalam setahun terakhir. Tampak bahwa distribusi rumah tangga penerima BSM tidak saja pada kelompok pengeluaran 20 persen terbawah tetapi juga termasuk kelompok 20 persen



Gambar 7.4 Persentase Rumah Tangga Penerima BSM di Provinsi Papua Barat Tahun 2015



teratas. Kurang dari 10 persen masyarakat miskin yang mendapat BSM SD maupun BSM SMP. Seperti halnya distribusi beras miskin, distribusi BSM belum menysasar pada target yang tepat.

Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)

Perkembangan akses teknologi komunikasi dan informasi di Papua Barat hingga tahun 2015 cukup pesat. Pengguna telepon selular atau HP di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 telah mencapai 84,75 persen, meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu 75,53 persen.

Seiring dengan kepemilikan telepon selular yang meningkat perkembangan penduduk yang mengakses internet juga mengalami peningkatan. Penduduk Papua Barat yang mengakses internet pada tahun 2015 telah mencapai 17,72 persen naik dibandingkan dengan pengguna internet tahun 2014 yang mencapai 13,30 persen.

Dilihat dari sebarannya, pengguna internet terbanyak di Provinsi Papua Barat adalah di Kota Sorong diikuti oleh Kabupaten Manokwari. Hampir 30 persen penduduk Kota Sorong mengakses di mana 86,78 persen pengguna internet di Kota Sorong memanfaatkan *handphone* sebagai media untuk mengakses internet. Di Kabupaten Manokwari, pengguna internet mencapai 18,64 persen. Data TIK selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran VII(1) dan Lampiran VII(2).



<http://papuabarat.bps.go.id>

I

(1) Indikator Kependudukan

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2000, 2010 dan 2015

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Per Tahun 2010 - 2015
	2000	2010	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Fakfak	51.295	66.828	73.468	1,58
Kab. Kaimana	30.115	46.249	54.165	2,63
Kab. Teluk Wondama	18.522	26.321	29.791	2,06
Kab. Teluk Bintuni	37.172	52.422	59.196	2,03
Kab. Manokwari	127.622	187.726	158.326	2,27
Kab. Sorong Selatan	22.487	37.900	43.036	2,12
Kab. Sorong	62.909	70.619	80.695	2,22
Kab. Raja Empat	33.605	42.507	45.923	1,29
Kab. Tambrauw	5.917	6.144	13.615	13,26
Kab. Maybrat	20.245	33.081	37.529	2,10
Kab. Manokwari Selatan			21.907	2,17
Kab. Pegunungan Arfak			28.271	2,20
Kota Sorong	119.800	190.625	225.588	2,81
Prov. Papua Barat	529.689	760.422	871.510	2,27

Sumber: BPS, SP2000, SP2010 dan Proyeksi Penduduk Tahun 2015.

I

(2) Indikator Kependudukan

Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2012–2015

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	4,85	4,95	5,04	5,13
Kaimana	2,66	2,76	2,84	2,93
Teluk Wondama	1,86	1,91	1,95	1,99
Teluk Bintuni	2,97	3,04	3,11	3,18
Manokwari	31,41	32,29	33,18	34,05
Sorong Selatan	5,15	5,27	5,40	5,52
Sorong	6,15	6,31	6,47	6,64
Raja Empat	7,22	7,32	7,45	7,55
Tambrauw	1,14	1,16	1,17	1,18
Maybrat	6,41	6,55	6,70	6,87
Kab. Manokwari Selatan	7,22	7,44	7,57	7,79
Kab. Pegunungan Arfak	9,42	9,64	9,96	10,19
Kota Sorong	186,14	191,71	198,01	204,15
Prov. Papua Barat	6,68	6,86	7,04	7,22

Sumber: BPS, Provinsi Papua Barat Dalam Angka Tahun 2012–2015



(1) Kesehatan

Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Barat Tahun 2011–2015.

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	67,28	67,35	67,40	67,62	67,72
Kaimana	62,66	62,89	63,21	63,57	63,59
Teluk Wondama	57,52	57,81	58,04	58,36	58,66
Teluk Bintuni	57,69	57,94	58,13	58,42	59,12
Manokwari	67,08	67,22	67,34	67,60	67,69
Sorong Selatan	64,80	64,97	65,08	65,34	65,35
Sorong	64,76	64,90	64,99	65,23	65,25
Raja Ampat	63,78	63,81	63,84	64,05	64,06
Tambrau	58,35	58,39	58,48	58,72	59,02
Maybrat	64,34	64,39	64,43	64,65	64,65
Manokwari Selatan	66,14	66,25	66,40	66,67	66,68
Pegunungan Arfak	66,04	66,17	66,25	66,49	66,49
Kota Sorong	67,69	67,84	67,96	69,02	69,04
Prov. Papua Barat	64,75	64,88	65,05	65,14	65,19

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, IPM Provinsi Papua Barat 2011–2014.



(2) Kesehatan

Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Penolong Kelahiran					
	Dokter (2)	Bidan (3)	Tenaga paramedis lain (4)	Dukun (5)	Lainnya (6)	
Fakfak	29,27	36,83	11,98	21,48	0,43	
Kaimana	19,13	50,81	4,59	18,12	6,01	
Teluk Wondama	12,51	54,91	4,63	14,34	13,61	
Teluk Bintuni	26,81	46,38	0,00	21,18	5,62	
Manokwari	40,79	41,82	0,00	7,10	8,39	
Sorong Selatan	44,82	23,71	4,62	22,17	4,69	
Sorong	8,85	71,77	8,69	9,49	1,21	
Raja Ampat	11,33	47,79	8,14	25,29	7,45	
Tambrauw	3,34	19,76	26,65	14,30	30,79	
Maybrat	25,87	46,36	7,08	15,63	5,05	
Manokwari Selatan	30,30	7,22	1,41	2,57	34,50	
Pegunungan Arfak	0,00	7,25	0,00	19,21	70,81	
Kota Sorong	25,95	59,17	5,56	7,35	1,97	
Papua Barat	25,00	47,02	5,28	13,56	7,81	

Sumber: BPS, Susenas 2015



(3) Kesehatan

Angka Kesakitan Penduduk di Provinsi Papua Barat, Tahun 2012–2015.

Kabupaten/Kota	Angka Kesakitan			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	7,98	4,44	3,50	9,77
Kaimana	8,31	11,88	16,84	11,43
Teluk Wondama	12,30	11,18	12,35	9,51
Teluk Bintuni	18,60	20,09	21,29	13,54
Manokwari	15,47	10,25	9,75	13,07
Sorong Selatan	12,48	8,23	12,85	15,42
Sorong	13,88	10,63	12,23	10,16
Raja Ampat	14,96	13,58	13,35	12,86
Tambrauw	6,42	10,23	8,27	7,33
Maybrat	11,47	6,72	3,67	3,31
Manokwari Selatan				7,62
Pegunungan Arfak				7,06
Kota Sorong	10,86	14,87	14,67	12,64
Prov. Papua Barat	12,76	11,38	11,78	11,46

Sumber: BPS, Susenas 2012–2015



(1) Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 25 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011–2015

Kabupaten/ Kota	Rata-rata Lama Sekolah				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	7,95	7,96	7,97	8,09	8,12
Kaimana	6,91	7,13	7,36	7,61	7,65
Teluk Wondama	6,33	6,36	6,43	6,50	6,52
Teluk Bintuni	6,84	6,98	7,28	7,44	7,45
Manokwari	7,37	7,47	7,58	7,70	7,75
Sorong Selatan	6,39	6,50	6,64	6,75	6,84
Sorong	6,51	6,79	7,06	7,14	7,46
Raja Ampat	6,52	6,58	7,16	7,32	7,39
Tambrau	4,15	4,27	4,40	4,53	4,61
Maybrat	5,89	5,91	5,92	5,96	6,22
Manokwari Selatan			6,12	6,20	6,21
Pegunungan Arfak			4,79	4,85	4,86
Kota Sorong	10,36	10,59	10,82	10,86	10,87
Prov. Papua Barat	6,82	6,87	6,91	6,96	7,01



(2) Pendidikan

Harapan Lama Sekolah Penduduk Berumur 7 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011–2015

Kabupaten/ Kota	Harapan Lama Sekolah				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	12,99	13,08	13,17	13,25	13,26
Kaimana	10,32	10,56	11,02	11,19	11,23
Teluk Wondama	9,25	9,61	9,97	10,26	10,33
Teluk Bintuni	10,56	10,87	10,94	11,21	11,30
Manokwari	12,57	12,57	12,96	13,15	13,38
Sorong Selatan	10,95	11,14	11,33	11,52	11,71
Sorong	12,13	12,24	12,35	12,38	12,60
Raja Ampat	10,93	11,07	11,20	11,34	11,44
Tambrau	9,93	10,02	10,46	10,73	10,80
Maybrat	11,56	11,74	11,92	12,11	12,21
Manokwari Selatan			12,13	12,18	12,19
Pegunungan Arfak			11,00	11,05	11,06
Kota Sorong	12,76	13,55	13,76	13,95	13,99
Prov. Papua Barat	11,21	11,45	11,67	11,87	12,06



(3) Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Barat, 2014–2015

Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Sekolah							
	7 - 12 Tahun		13 - 15 Tahun		16 - 18 Tahun		19 - 24 Tahun	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Fakfak	98,58	98,86	97,73	96,56	86,80	90,89	26,03	26,12
Kaimana	98,39	98,75	93,22	95,52	77,18	70,60	14,24	8,11
Teluk Wondama	94,12	94,71	85,39	95,45	67,62	70,99	16,04	14,40
Teluk Bintuni	96,39	98,61	90,56	94,98	68,42	69,97	9,99	9,55
Manokwari	95,56	98,11	96,04	97,88	78,67	81,66	41,75	37,44
Sorong Selatan	95,47	97,98	97,22	94,98	71,83	70,37	23,84	29,73
Sorong	97,95	99,71	95,79	100,00	82,25	81,39	29,29	27,42
Raja Ampat	94,67	97,32	100,00	98,01	73,22	77,25	10,97	22,27
Tambrauw	94,36	94,87	92,34	97,99	81,40	74,14	8,65	43,77
Maybrat	95,58	97,15	100,00	99,10	90,79	93,12	25,35	38,12
Manokwari Selatan		93,42		92,90		81,67		23,08
Pegunungan Arfak		89,47		70,23		47,58		6,60
Kota Sorong	98,41	94,26	99,06	98,35	84,40	84,08	32,91	39,67
Papua Barat	96,65	96,74	96,28	96,58	79,87	79,99	29,66	29,96

Sumber: BPS, Susenas 2014 dan 2015



(4) Pendidikan

Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat, 2014—2015

Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Murni							
	SD		SMP		SMA		PT	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Fakfak	92,64	91,15	75,78	69,56	80,00	52,79	22,82	11,20
Kaimana	92,25	95,94	56,99	48,28	60,48	48,61	3,75	2,57
Teluk Wondama	92,26	94,71	54,17	47,89	42,51	49,59	6,91	3,18
Teluk Bintuni	95,02	94,85	62,33	59,63	52,22	55,01	4,57	5,87
Manokwari	93,31	97,61	68,80	69,34	58,76	69,22	37,04	29,42
Sorong Selatan	88,84	96,20	69,13	61,41	55,10	47,13	13,76	22,12
Sorong	94,05	91,92	68,17	88,49	71,08	71,26	23,39	18,42
Raja Ampat	92,76	95,86	58,42	68,72	52,86	61,17	1,98	4,53
Tambrau	94,36	93,38	64,36	69,30	29,65	43,48	n.a	0,00
Maybrat	90,98	86,75	68,73	71,83	57,28	64,16	5,59	18,36
Manokwari Selatan		93,42		62,35		67,71		8,88
Pegunungan Arfak		89,09		30,70		6,88		0,00
Kota Sorong	92,55	89,46	74,92	75,55	69,73	72,91	32,07	31,81
Papua Barat	92,76	92,90	68,18	68,29	62,29	62,40	24,19	20,55

Sumber: BPS, Susenas 2014 dan 2015



(1) Taraf dan Pola Konsumsi

Perkembangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2013 dan 2014

Kabupaten/ Kota	September 2013			September 2014		
	GK Rp./kap/bln	P0 (%)	Penduduk Miskin (000)	GK Rp./kap/bln	P0 (%)	Penduduk Miskin (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	394.248	29,84	21,25	419.644	29,18	21,24
Kaimana	309.655	18,60	9,57	327.197	17,65	9,37
Teluk Wondama	403.964	39,43	11,31	431.100	38,81	11,40
Teluk Bintuni	492.193	40,33	22,96	521.639	38,92	22,76
Manokwari	475.559	28,45	56,66	497.067	27,63	56,72
Sorong Selatan	255.932	20,50	8,47	261.095	19,73	8,37
Sorong	279.725	35,48	27,38	286.937	34,30	27,27
Raja Ampat	273.436	21,16	9,47	279.642	20,73	9,46
Tambrau	281.586	38,68	5,19	287.577	38,35	5,21
Maybrat	283.440	35,64	12,83	289.229	35,20	13,01
Kota Sorong	536.584	19,27	41,15	557.832	18,37	40,65
Prov. Papua Barat	397.003	27,14	226,24	428.608	26,26	225,46

Sumber: BPS, Susenas 2013 dan 2014



(2) Taraf dan Pola Konsumsi

Garis Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2011–2016

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2011	251.752	90.958	342.709
Maret 2012	255.001	94.677	349.678
Maret 2013	276.018	106.887	382.905
Maret 2014	303.954	112.203	416.158
Maret 2015	328.107	123.915	452.022
Maret 2016	355.672	132.055	487.727
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2011	255.647	56.090	311.737
Maret 2012	271.489	55.125	326.613
Maret 2013	292.615	63.223,84	355.839
Maret 2014	321.560	68.252	389.812
Maret 2015	358.458	76.749	435.207
Maret 2016	382.574	84.422	466.996
<u>Kota+Desa</u>			
Maret 2011	254.759	64.036	318.796
Maret 2012	266.576	66.908	333.485
Maret 2013	287.655	76.275	363.929
Maret 2014	316.314	81.348	397.662
Maret 2015	346.975	94.594	441.569
Maret 2016	372.548	102.419	474.967

Sumber: BPS, Susenas Panel 2010 - 2015



(3) Taraf dan Pola Konsumsi

Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2009–2016

Daerah/Tahun	Kota	Desa	Kota dan Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)</u>			
Maret 2008	0,73	11,67	9,18
Maret 2009	0,43	12,51	9,75
Maret 2010	1,14	13,22	10,47
Maret 2011	0,80	11,13	8,78
Maret 2012	1,23	9,78	7,23
Maret 2013	0,61	8,81	6,35
Maret 2014	1,30	8,28	6,20
Maret 2015	0,72	9,60	6,24
Maret 2016	0,85	11,18	7,21
<u>Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)</u>			
Maret 2008	0,24	4,46	3,50
Maret 2009	0,04	4,61	3,57
Maret 2010	0,36	5,47	4,30
Maret 2011	0,14	4,40	3,43
Maret 2012	0,34	3,63	2,65
Maret 2013	0,11	3,03	2,16
Maret 2014	0,39	2,75	2,05
Maret 2015	0,18	3,64	2,33
Maret 2016	0,19	4,46	2,82

Sumber: BPS, Susenas Panel 2008 - 2016



(4) Taraf dan Pola Konsumsi

Kemampuan Daya Beli Masyarakat di Papua Barat, 2011–2015

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun (000)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fak-Fak	5.558	5.793	6.662	6.731	6.796
Kaimana	6.532	6.850	7.167	7.224	7.341
Teluk Wondama	6.606	6.884	7.162	7.222	7.317
Teluk Bintuni	8.211	8.537	8.862	8.929	9.129
Manokwari	10.182	10.584	10.987	11.069	11.328
Sorong Selatan	5.052	5.267	5.483	5.520	5.550
Sorong	5.643	5.706	6.365	6.436	6.457
Raja Ampat	6.437	6.729	7.020	7.061	7.191
Tambrau	3.702	4.020	4.339	4.405	4.431
Maybrat	4.099	4.309	4.519	4.562	4.576
Manokwari Selatan			4.109	4.149	4.578
Pegunungan Arfak			4.522	4.563	4.570
Kota Sorong	11.776	11.786	12.455	12.515	12.590
Prov. Papua Barat	6.709	6.732	6.896	6.944	7.064



(1) Perumahan dan Lingkungan

Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Perumahan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2014–2015

Kabupaten/kota	Lantai Bukan Tanah		Atap Layak		Dinding Permanen	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Fakfak	97,31	99,25	99,71	99,70	80,53	77,85
Kab. Kaimana	92,64	92,68	97,95	99,14	61,64	62,91
Kab. Teluk Wondama	99,50	98,42	97,69	95,49	36,11	35,76
Kab. Teluk Bintuni	96,68	98,38	96,15	97,06	17,27	22,14
Kab. Manokwari	98,95	99,15	99,69	98,73	61,43	61,55
Kab. Sorong Selatan	97,88	99,04	85,94	86,18	42,20	39,22
Kab. Sorong	93,25	94,43	99,55	99,30	52,04	52,82
Kab. Raja Ampat	93,68	98,08	94,60	89,65	44,88	42,91
Kab. Tambrau	93,65	98,10	79,54	86,76	11,65	26,92
Kab. Maybrat	97,83	98,11	97,01	96,03	61,57	72,58
Kab. Manokwari Selatan	N.A	96,91	N.A	95,62	N.A	28,30
Kab. Pegunungan Arfak	N.A	100,00	N.A	96,01	N.A	4,57
Kota Sorong	99,65	98,67	99,16	98,55	79,91	85,27
Prov. Papua Barat	97,25	97,96	97,61	97,10	58,37	59,27

Sumber: BPS, Susenas 2014 dan 2015



(2) Perumahan dan Lingkungan

Persentase Rumah Tangga yang Meangakses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2014–2015

Kabupaten/kota	Air Minum Layak*		Sanitasi Layak*	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Fakfak	87,97	74,85	49,53	29,18
Kab. Kaimana	73,85	76,78	57,29	69,99
Kab. Teluk Wondama	12,38	25,70	69,64	79,65
Kab. Teluk Bintuni	79,82	88,89	63,83	57,48
Kab. Manokwari	65,16	64,07	69,48	77,86
Kab. Sorong Selatan	46,02	62,34	50,26	62,06
Kab. Sorong	86,63	90,27	61,17	64,51
Kab. Raja Ampat	45,27	63,28	44,73	49,12
Kab. Tambrauw	7,08	29,33	48,65	55,92
Kab. Maybrat	18,39	31,63	17,21	30,38
Kab. Manokwari Selatan	N.A	60,13	N.A	54,51
Kab. Pegunungan Arfak	N.A	31,64	N.A	29,87
Kota Sorong	85,11	94,69	80,61	76,71
Prov. Papua Barat	66,87	72,95	61,85	62,81

Sumber: BPS, Susenas 2014 dan 2015



(3) Perumahan dan Lingkungan

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2014–2015

Kabupaten/kota	Listrik PLN		Listrik Non PLN	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Fakfak	71,23	71,75	20,62	17,88
Kab. Kaimana	56,19	60,74	15,05	15,39
Kab. Teluk Wondama	31,37	45,90	20,94	20,15
Kab. Teluk Bintuni	70,41	76,65	27,45	15,23
Kab. Manokwari	76,14	98,90	9,69	0,77
Kab. Sorong Selatan	71,26	87,85	5,98	4,59
Kab. Sorong	88,50	89,78	7,58	7,99
Kab. Raja Ampat	3,46	0,00	68,98	81,72
Kab. Tambrau	10,97	29,56	35,94	26,65
Kab. Maybrat	22,28	40,80	48,47	31,21
Kab. Manokwari Selatan	N.A	73,72	N.A	15,60
Kab. Pegunungan Arfak	N.A	7,87	N.A	14,49
Kota Sorong	99,60	99,39	0,25	0,61
Prov. Papua Barat	68,72	75,95	16,95	12,93

Sumber: BPS, Susenas 2014 dan 2015



(1) Sosial Lainnya

Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Alat Komunikasi Informasi dan Teknologi di Provinsi Papua Barat Tahun 2014–2015

Kabupaten/Kota	Telepon Rumah		Handphone		Destop/PC		Laptop/ notebook	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Fakfak	1,90	1,43	79,10	83,38	1,67	28,25	18,95	29,97
Kab. Kaimana	2,21	7,08	57,45	80,49	2,74	56,92	14,55	33,84
Kab. Teluk Wondama	1,13	0,00	72,46	79,92	2,32	26,10	17,00	19,02
Kab. Teluk Bintuni	0,10	0,00	72,58	85,06	2,96	12,48	14,69	40,23
Kab. Manokwari	2,17	2,44	80,49	70,58	7,18	32,44	26,55	43,24
Kab. Sorong Selatan	1,75	1,30	63,80	86,80	3,37	45,32	15,41	40,48
Kab. Sorong	1,50	0,84	87,06	85,65	2,78	14,52	9,48	32,69
Kab. Raja Ampat	2,28	0,00	69,79	88,97	1,12	13,87	11,85	31,22
Kab. Tambrau	0,17	0,00	16,99	100,00	N.A	0,00	0,55	74,58
Kab. Maybrat	N.A	0,00	16,84	87,69	N.A	2,02	0,60	53,62
Kab. Manokwari Selatan	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00
Kab. Pegunungan Arfak	N.A	6,56	N.A	90,79	N.A	20,38	N.A	53,49
Kota Sorong	3,18	9,26	99,01	75,33	8,50	34,81	36,68	26,23
Prov. Papua Barat	1,89	3,95	75,53	84,75	4,59	23,69	20,56	44,53

Sumber: BPS, Susenas 2014 dan 2015

VII

(2) Sosial Lainnya

Persentase Penduduk yang Mengakses Internet di Provinsi Papua Barat Tahun 2015

Kabupaten/Kota	% Penduduk Yang Mengakses Internet	Tempat Mengakses Internet					Di Dalam Kendaraan Bergerak
		Rumah Sendiri	Bukan Rumah Sendiri	Tempat Bekerja/ Kantor	Sekolah/ Kampus	Tempat Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Fakfak	12,44	86,47	17,11	26,05	12,41	25,77	1,41
Kaimana	10,99	77,72	45,51	32,31	11,02	20,62	1,36
T. Wondama	11,20	72,06	9,05	23,04	5,25	14,00	0,00
T. Bintuni	16,90	64,67	21,39	39,86	10,78	22,33	1,85
Manokwari	18,64	77,66	19,54	21,22	34,36	34,56	10,37
Sorong Selatan	7,29	84,07	19,91	37,72	14,99	46,64	4,31
Sorong	16,84	87,63	22,64	27,37	35,95	41,18	5,37
Raja Ampat	15,82	91,69	18,47	31,98	13,00	24,00	3,82
Tambrau	0,48	100,00	74,58	0,00	74,58	74,58	0,00
Maybrat	4,56	84,54	28,41	85,27	0,00	29,74	0,00
Manokwari Selatan	4,09	65,67	20,32	15,89	28,95	49,12	18,83
Pegunungan Arfak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota Sorong	31,14	95,07	21,76	28,80	24,69	29,25	16,44
Papua Barat	17,72	86,78	21,65	28,70	23,99	30,25	10,53

Sumber: BPS, Susenas 2015

DATA

Mencerdaskan Bangsa



BPS PROVINSI PAPUA BARAT

Jl. Trikora Sowi - Manokwari - Papua Barat - 98315

E-mail : papuabaratar@mailhost.bps.go.id

Homepage : papuabaratar.bps.go.id

ISSN : 2089-1652

